



PEMERINTAH KOTA  
DENPASAR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ditengah Pandemi Covid-19 baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan



aparatus pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 29 Maret 2021

WALIKOTA DENPASAR



GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Tlp. (0361) 234876 Fax. (0361) 227160  
[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id) email: [inspektorat@denpasarkota.go.id](mailto:inspektorat@denpasarkota.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 26 Maret 2021

**Plt. Inspektur Kota Denpasar**

  
**Ir. Putu Naning Diyaningsih, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN REVIU .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR	3
C.1. Kondisi Geografis .....	3
C.2. Kondisi Demografis .....	7
C.3. Pertumbuhan Ekonomi .....	9
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI.....	12
a. Kewenangan.....	12
b. Tugas Pokok.....	13
c. Struktur Organisasi.....	13
E. Aparatur Pemerintah.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
C. Formula Perhitungan Pencapaian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	32
B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.....	35
C. Akuntabilitas Keuangan.....	107
D. Analisa Efisiensi.....	111
BAB IV PENUTUP .....	113
LAMPIRAN .....	118

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan / Desa / Kelurahan di Kota Denpasar.....	4
Tabel 1.2	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2017–2019.....	6
Tabel 1.3	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2020.....	7
Tabel 1.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2016-2020 .....	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	20
Tabel 2.2	Tujuan / Sasaran dan Anggaran Kinerja .....	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020.....	25
Tabel 2.4	Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar .....	27
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2020 .....	32
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja .....	34
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional.....	37
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya .....	41
Tabel 3.5	Capaian kegiatan sasaran Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.....	41
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Mengentaskan Kemiskinan .....	44
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Mengurangi Pengangguran .....	48
Tabel 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten / Kota 2020.....	48
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.....	51
Tabel 3.10	Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2018-2020 menurut Kabupaten / Kota .....	52
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat .....	54

Tabel 3.12	Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020.....	54
Tabel 3.13	Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2018-2020 ..	56
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak .....	59
Tabel 3.15.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan .....	61
Tabel 3.16	Data Pengurangan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Tahun 2020.....	62
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur .....	71
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel....	77
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan .....	82
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa .....	87
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil .....	89
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Nilai Investasi.....	95
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya .....	98
Tabel 3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	105
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2020 .....	106
Tabel 3.26	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 .....	108
Tabel 3.27	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2020 .....	109
Tabel 3.28	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar.....	110
Tabel 3.29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 1.1	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2020.....	8
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi kota Denpasar 2015 - 2019.....	10
Gambar 1.3	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Januari 2018 – Januari 2020 .....	11
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	14
Gambar Grafik 3.1	Capaian Kinerja .....	35
Gambar Grafik 3.2	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020.....	45
Gambar Grafik 3.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Denpasar Tahun 2016 - 2020 .....	46
Gambar 3.4	Kualitas Kemiskinan Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	46
Gambar Grafik 3.5	Perbandingan Angka Pengangguran Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020.....	49
Gambar 3.6	Bursa erja Online (BKOL) Berbasis User.....	50
Gambar 3.7	Rapat pembahasan awal penyusunan DED Kawasan Pesanggaran Suwung terkait penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar .....	65
Gambar 3.8	Rapat penyusunan drat Peraturan Walikota tentang RP2KPKPK.....	66
Gambar 3.9	Pembentukan Badan Jalan Menggunakan Limestone di Jalan Tukad Pekaseh Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan .....	72
Gambar 3.10	Pemeliharaan IPAL Komunal di Kota Denpasar .	74
Gambar 3.11	Pembuatan Pipa Sambungan Rumah DSDP di Desa Pemogan dan sekitarnya Kec. Denpasar Selatan.....	74
Gambar 3.12	Sistem e-Pokir .....	80
Gambar 3.13	Sistem <i>Logical Framework</i> dan <i>Cascading</i> .....	81
Gambar 3.14	Festival Rumah Belanja.....	84
Gambar 3.15	Gema Tridatu .....	85

Gambar 3.16	Monitoring Barang Pokok Penting menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.....	85
Gambar 3.17	Pelaksanaan Diklat Pengawasan bagi Pengawas Koperasi .....	91
Gambar 3.18	Pelaksanaan Monev Pasca Diklat Bagi Peserta Diklat Koperasi.....	91
Gambar 3.19	Pelaksanaan Diklat PKL Penataan Gajah Mada .	93
Gambar 3.20	Pelaksanaan Pameran Dalam Rangka HUT Kota Denpasar.....	94
Gambar 3.21	Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2015-2020.....	96
Gambar 3.22	Kegiatan “Virtual Sale” .....	100
Gambar 3.23	Webinar tradisional spirit (arak bali) dan Komptensi food and beverage .....	102
Gambar 3.24	Kegiatan Denpasar Festival Secara Virtual .....	103

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan Tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 29 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
  - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik (mencapai target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target) dan 1 indikator sasaran nilainya belum tersedia (N/A).
- Misi 2. terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja :
  - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 7 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) dan 4 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

- Misi 3. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
  - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- Misi 4. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja :
  - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (mencapai target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target), 1 indikator sasaran kategori Cukup dan 2 indikator sasaran kategori Kurang.
- Misi 5. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
  - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 12 indikator atau 41,37% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 13 indikator atau 44,83% kategori Baik, 1 indikator atau 3,45% kategori Cukup, 2 indikator atau 6,9% kategori Kurang dan 1 indikator atau 3,45% kategori Data Belum Tersedia. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 94,07% atau bermakna Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 termasuk dalam Kategori “Baik”.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020, serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD

Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Tahun 2020 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Denpasar Tahun 2020 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

## **C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

### **C.1. Kondisi Geografis**

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Sebagai Ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)

Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung

Sebelah selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Bena

Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara geografis Kota Denpasar terletak di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 12.778 Ha (2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali) yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km<sup>2</sup> (39,12% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km<sup>2</sup> (24,59%), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km<sup>2</sup> (18,83%). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km<sup>2</sup> (17,46 %). Selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kota Denpasar**

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara	3142	24.59
	1.1 Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4.52
	1.2 Desa Dangin Puri Kangin	75	2.39
	1.3 Kelurahan Tonja	230	7.32
	1.4 Desa Dangin Puri Kauh	72	2.29
	1.5 Desa Pemecutan Kaja	385	12.25
	1.6 Desa Ubung	103	3.28
	1.7 Desa Ubung Kaja	430	13.69
	1.8 Desa Dauh Puri Kaja	109	3.47
	1.9 Kelurahan Peguyangan	644	20.50
	1.10 Desa Peguyangan Kaja	536	17.06
	1.11 Desa Peguyangan Kangin	416	13.24
2	Kecamatan Denpasar Barat	2406	18.83
	2.1 Desa Padang Sambian Klod	412	17.12
	2.2 Desa Pemecutan Klod	442	18.37
	2.3 Desa Kauh Puri Kauh	183	7.61
	2.4 Desa Kauh Puri Klod	188	7.81

	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2.49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2.45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7.73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2.58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1.45
	2.1	Kelurahan Padang Sambian	370	15.38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2231	17.46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9.37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12.01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10.71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12.60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17.03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2.24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2.33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3.90
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	62	2.78
	3.1	Kelurahan Penatih	291	13.04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13.98
4	Kecamatan Denpasar Selatan		4999	39.12
	4.1	Desa Pemogan	971	19.42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14.78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
	3.1	Desa Sanur Kaja	269	5.38
<b>Kota Denpasar</b>			<b>12.778</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2019

Menurut penggunaan tanah, luas wilayah Kota Denpasar sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran, dan lainnya. Luas lahan pertanian, yaitu lahan sawah irigasi berkurang dari tahun ke tahun. Luas lahan pertanian dari tahun 2018-2019 berkurang seluas 212 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya.

Meskipun jumlah luas lahan sawah di Kota Denpasar terbatas, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah yang ada melalui organisasi/perkumpulan para petani sawah yang dikenal dengan nama subak, serta mulai mengembangkan ekowisata. Subak merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam pengusahaan tanaman padi dan palawija.

Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar Tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2017-2019**

Penggunaan Lahan		2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
1	Lahan Pertanian	2.919	2.680	2.468
	Lahan Sawah Irigasi	2.409	2.170	1.958
	Lahan Pertanian Bukan Sawah	510	510	510
	- Tegalan	390	390	390
	- Perkebunan	35	35	35
	- Hutan Rakyat	75	75	75
	- Lainnya	10	10	10
2	Lahan bukan Pertanian (Pekarangan, jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	9.859	10.098	10.310
<b>Jumlah</b>		<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2019

## C.2. Kondisi Demografis

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembangunan dibidang kependudukan bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Beban tersebut diantaranya pengangguran yang tinggi, kriminalitas meningkat dan perekonomian yang buruk. Selain kualitas penduduknya, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

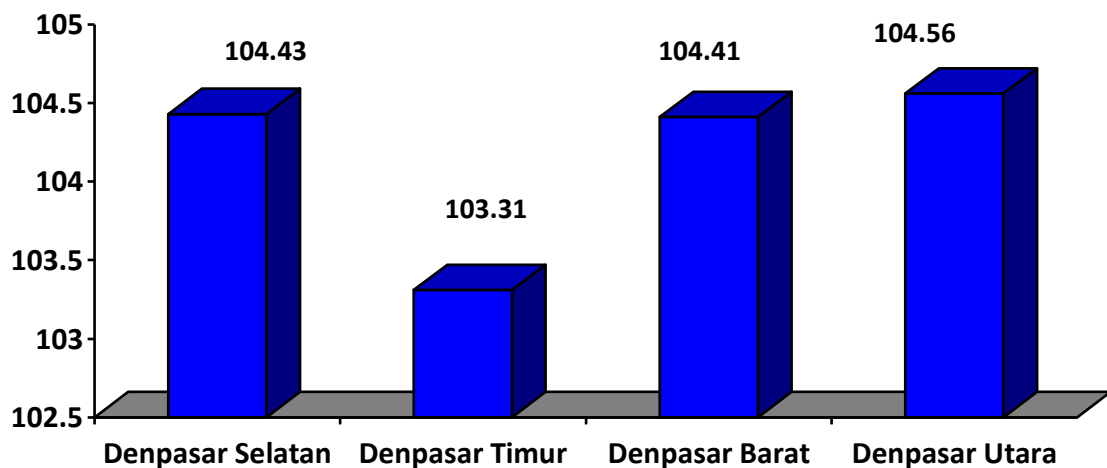
**Tabel 1.3 Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2020**

Kecamatan	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Denpasar Selatan	152.770	156.080	159.170	146.280	149.300	152.420	299.050	305.380	311.590
Denpasar Timur	80.240	81.410	82.430	77.650	78.740	79.790	157.890	160.150	162.220
Denpasar Barat	137.450	139.830	142.010	131.580	133.810	136.010	269.030	273.640	278.020
Denpasar Utara	104.640	106.380	107.890	99.990	101.550	103.180	204.630	207.930	211.070
<b>Kota Denpasar</b>	<b>475.100</b>	<b>483.700</b>	<b>491.500</b>	<b>455.500</b>	<b>463.400</b>	<b>471.400</b>	<b>930.600</b>	<b>947.100</b>	<b>962.900</b>

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2020 mencapai 962.900 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 491.500 jiwa (51,04%) dan jumlah penduduk perempuan 471.400 jiwa (48.96%). Dominasi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan terlihat pada seluruh kecamatan yang ada di Denpasar. Pada tahun 2010, 2015, dan proyeksi di tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Denpasar Timur tercatat yang terendah, dengan sex ratio pada kisaran 103. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat yang memiliki rasio jenis kelamin sebesar 104. Sementara Kecamatan Denpasar Utara memiliki rasio jenis kelamin

tertinggi sebesar 105. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan sekitar 103-105 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

**Gambar Grafik 1.1 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2020**



Selain laju pertumbuhan penduduk, yang menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Kota Denpasar di Tahun 2020 mencapai 7.536 jiwa per Km<sup>2</sup>. Angka ini sangat jauh diatas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 757 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan yang ada, maka Kecamatan Denpasar Barat merupakan kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 11.555 jiwa per Km<sup>2</sup>. Angka ini mencapai 1,5 kali lipat kepadatan Kota Denpasar. Sementara itu, kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Denpasar Selatan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 6.233 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Padatnya penduduk di Kecamatan Denpasar Barat erat kaitannya dengan fungsi sentral dari Kota Denpasar, disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan maupun kesehatan. Sementara Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan (growth pole)

khususnya pada industri pariwisata. Saat ini pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan terus digenjot untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar.

**Tabel 1.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2016-2020**

Uraian	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
<b>2016</b>	897.30	7.022
<b>2017</b>	914.30	7.155
<b>2018</b>	930.60	7.283
<b>2019</b>	947.10	7.412
<b>2020</b>	962.90	7.536

Sumber : Proyeksi Penduduk Denpasar 2010-2020,  
BPS Kota Denpasar, 2020

### C.3. Pertumbuhan Ekonomi

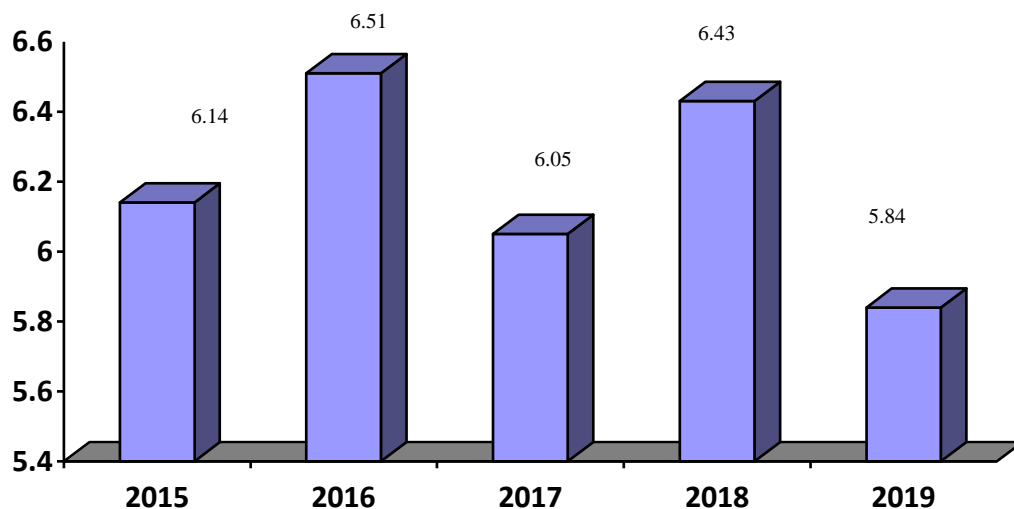
Perekonomian Kota Denpasar ditunjang dari berbagai sektor, selama periode 2015 hingga 2019, ekonomi Denpasar didominasi oleh empat lapangan usaha, yaitu :

1. Penyediaan akomodasi & makan minum,
2. Jasa pendidikan,
3. Konstruksi,
4. Perdagangan besar & ecaran, reparasi mobil dan motor.

Tahun 2019 ekonomi Denpasar tumbuh sebesar 5,84 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 yang mampu tumbuh hingga 6,43 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya beberapa pertumbuhan lapangan usaha yang menjadi *leading sector* ekonomi Denpasar seperti penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa pendidikan.

Secara rinci Trend Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.2.

**Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi kota Denpasar 2015 - 2019**



Sumber : Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar, 2020

Ditahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, Kota Denpasar yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang cukup signifikan terutama pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Denpasar. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran virus corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat.

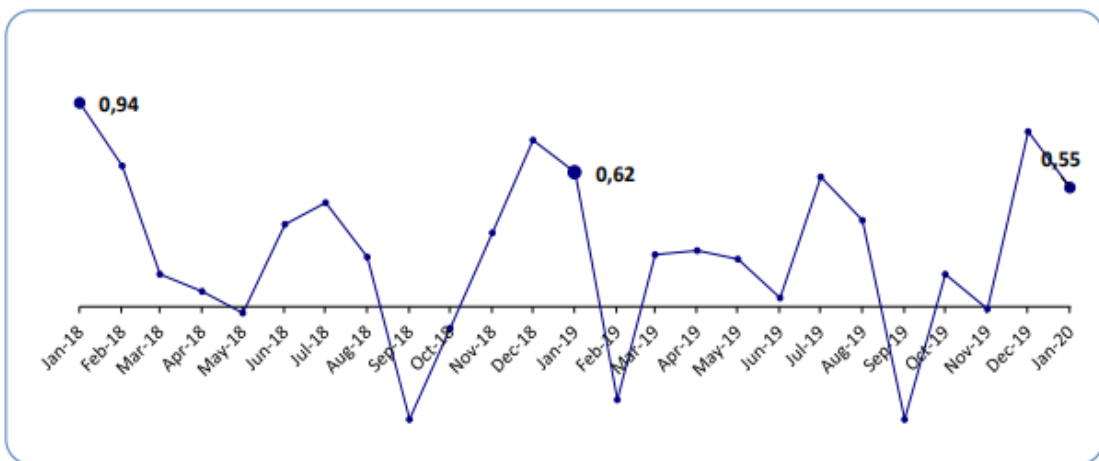
Terhambatnya aktivitas perekonomian membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Bali, jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 73.520 pekerja dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2.663 pekerja (data per 24 Juni 2020). Sementara itu, data pekerja Kota Denpasar menunjukkan jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 12.929 pekerja dan 854 pekerja yang di PHK.

Dengan berkurangnya lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan penduduk Kota Denpasar secara kuantitas menjadi semakin meningkat yaitu dari 19.830 jiwa pada Maret 2019 menjadi sebanyak 20.480 jiwa pada Maret 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 2,14%. Namun persentase penduduk miskin Denpasar masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Bali yang sebesar 3,78% pada Maret 2020.

Pada bulan Januari 2020, dari 90 kota amatan inflasi tercatat 79 kota mengalami inflasi dan 11 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Meulaboh (Aceh) setinggi 1,44 persen sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Gorontalo (Gorontalo) setinggi 0,03 persen.

Sementara itu, deflasi terdalam tercatat di Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) sedalam -1,39 persen sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Kudus (Jawa Tengah) sedalam -0,01 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Denpasar dengan inflasi 0,55 menempati urutan ke-32 dari 79 kota yang mengalami inflasi. Sedangkan inflasi Kota Denpasar menduduki urutan ke-32 (0,55%) dari 79 kota yang mengalami inflasi dengan Kota Meulaboh menduduki peringkat inflasi tertinggi (1,44%). Perkembangan inflasi Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 1.3

**Gambar 1.3 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Januari 2018 – Januari 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

## **D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **a. Kewenangan**

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ;

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) Tenaga kerja
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;

- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian.

#### **b. Tugas Pokok**

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

#### **c. Struktur Organisasi**

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar 1.4.

**Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar**



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

### E. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2020 sebanyak 5.598 orang, terdiri dari :

#### 1. Berdasarkan Eselonisasi

NO	ESELON	JUMLAH
1	II.a	1
2	II.b	30
3	III.a	38
4	III.b	108
5	IV.a	447
6	IV.b	83
7	Non Eselon	4.891
JUMLAH		5.598

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar

#### 2. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	APDN	1
2	D.I	20
3	D.II	104
4	D.III	458
5	D.IV	45
6	D-I / A-I	3
7	D-II / A-II	33
8	D-III / A-III	11
9	S 1 / A IV	442
10	S1	2.746
11	S1.IIP	5
12	S2	459
13	S3	4
14	Sarmud	6
15	SD	98
16	SLTA	1.038
17	SLTP	124
18	STPDN	1
JUMLAH		5.598

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar

### 3. Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Guru	2.089
2	Medis dan Paramedis	709
3	JFT lainnya	123
4	Pelaksana	1.970
5	Struktural	707
JUMLAH		5.598

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar

### 4. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	117
2	II	976
3	III	2.904
4	IV	1.601
JUMLAH		5.598

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar

## F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah kota Denpasar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### 1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, kewenangan, tugas pokok serta struktur Organisasi.

### 2. BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja pengukuran kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

### 3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini menguraikan tentang :

#### a. Realisasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar

Pada sub bab ini diuraikan realisasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

**4. BAB IV Penutup**

Menguraikan secara umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar serta Langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

**Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 :**  
**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM**  
**KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi Kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi Kota nyaman, mandiri, adil dan

sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan 5 (lima) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3		4	
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)
				2	Indeks Tri Hita Karana
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG (%)
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG (%)
				10	Katagori Kota Layak Anak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%)
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%)
				13	Titik Genangan
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (SR)
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%)
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%)
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP (%)
		15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
				26	Lama Tinggal Wisatawan (hari)
					- Asing - Domestik
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)				
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi (%)
				29	Indeks LH

Sumber: RPJMD Kota Denpasar

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan Tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.161.825.957.479,53 (47,81%) dari total Belanja pada APBD Kota Denpasar TA 2020 sebesar Rp 2.430.171.684.720,62. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Denpasar sampai 7 (tujuh) kali melaksanakan refocusing anggaran yang difokuskan kepada pencegahan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan pemulihan perekonomian. Sampai dengan refocusing anggaran ke-7, mengacu pada Perwali Kota No. 57 Tahun 2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp Rp. 2.180.779.275.576,13. Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020**

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	50,637,685,224.00
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	432,142,075,034.95
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) berdasarkan penegakan supremasi hukum ( <i>low enforcement</i> )	7,842,341,128.00
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( <i>Welfare Society</i> ) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	17,722,337,541.00
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	42,181,393,439.16

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2020 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2020 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 29 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1	2	3	4		
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.320
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80,11
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,05
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,30
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,51
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,9
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78,75
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	66,84
		13	Titik Genangan	Titik	4
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	80.582
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,94

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1		2		3	4
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	A
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,7
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,6
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	70
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2,5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	635.329
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3.15
			- Domestik	Hari	3.12
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran,	Juta rupiah	293.329,39

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020
1		2	3	4
		Pajak Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28 Sampah tereduksi	Persen	28
		29 Indeks LH	Indeks	55

Sumber : Penetapan Kinerja Tahun 2020

### C. Formula Perhitungan Pencapaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran pencapaian ke-29 (dua puluh sembilan) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka disusun formula perhitungan IKU dan sumber data, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil pemetaan/survey Dinas Pertanian
2	Indeks Tri Hita Karana	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil penghitungan/survey Dinas Kebudayaan
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N / A	Hasil penghitungan/survey Dinas Kebudayaan
4	Angka Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Banyaknya Orang Miskin}}{\text{Total Penduduk Denpasar}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik
5	Angka Pengangguran (%)	$\frac{\text{Banyaknya Pengangguran}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/survey Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
7	Indeks Pendidikan	$\frac{I_{\text{Harapan Lama Sekolah}} + I_{\text{Rata-rata Lama Sekolah}}}{2}$	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari keterwakilan perempuan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
10	Katagori Kota Layak Anak	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat	Hasil Penilaian dari Pemerintah Pusat
11	Luas permukiman kumuh (%).	$\frac{\text{Penurunan luasan kawasan Permukiman Kumuh dari target luasan Tahun n-1}}{\text{Luasan awal RPJMD}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/ survey Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
12	Jalan Kondisi Baik (%).	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jalan (486.084,35 m)}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/ survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Titik Genangan (%)	$\frac{\text{Jumlah Titik Genangan Tahun N}}{\text{Titik Genangan Kondisi Awal RPJMD (8 titik)}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/ survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	$\frac{\text{Rumah Tangga Terakses Sistem Jaringan Sanitasi}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/ survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	$\frac{\text{Masyarakat Terlayani Air Bersih}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$	Hasil pemetaan/ survey Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total SKM PD/UPP}}{\text{Total PD/UPP}} \times 100\%$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	$\frac{\text{Hasil penghitungan BPS - Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}}{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	$\frac{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun N - Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}}{\text{Hasil penghitungan BPS Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Hasil penghitungan/ survey Badan Pusat Statistik
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	$\frac{\text{Jumlah LPD Sehat}}{\text{Total LPD di Kota Denpasar}} \times 100\%$	Hasil Penilaian Bagian Perekonomian
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	$\frac{\text{Jml peningkatan Tahun N + Jml Peningkatan Tahun Sebelumnya}}{\text{Target Kondisi Akhir RPJMD (750 Unit UM yang meningkat)}} \times 100\%$	Hasil penilaian Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	$\frac{\text{Jml Koperasi Yang SHU nya Meningkat}}{\text{Jml Koperasi Kondisi Awal RPJMD (1.049)}} \times 100\%$	Hasil penilaian Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
24	Investasi yg tercatat di PTSP	$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun N}}{\text{Jumlah Investasi N-1}} \times 100\%$	Hasil penghitungan Investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Total wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar selama satu tahun	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
26	Lama Tinggal Wisatawan	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu Tamu Yang Datang \& Menginap}}{\text{Banyaknya Malam Tamu Asing}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
	- Asing	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu Asing}}{\text{Tamu Asing Yang Datang \& Menginap}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
	- Domestik	$\frac{\text{Banyaknya Malam Tamu Domestik}}{\text{Tamu Domestik Yang Datang \& Menginap}}$	Hasil penghitungan Dinas Pariwisata
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Penerimaan Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan	Hasil penghitungan Badan Pendapatan Kota Denpasar
28	Sampah tereduksi (%)	$\frac{\text{Volume Sampah Yang Didaur Ulang}}{\text{Jumlah Volume sampah kota}} \times 100\%$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
29	Indeks LH	$\frac{\text{Indeks Kualitas Air + Indeks Kualitas Udara + Indeks Kualitas Tutupan Lahan}}{3}$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 16 (enam belas) sasaran. Dari 29 (dua puluh sembilan) IKU terdapat 1 (satu) indikator yang N/A (*Not Available*) atau tidak dapat diukur, yaitu Indeks Kebudayaan. Sampai dengan Tahun 2020 belum pernah dilaksanakan pengukuran terhadap indeks kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota.



Formula penghitungan terhadap IKU Kota Denpasar sebagian merupakan formula yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagian IKU mengadopsi formula pengukuran yang sudah dilaksanakan secara nasional, baik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kementerian. Selain itu, sumber data untuk mendapatkan capaian juga berasal dari capaian yang memang hasil penghitungan dari perangkat daerah teknis maupun yang terpublikasi secara resmi dari BPS dan Kementerian.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 94,07% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

**Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 1 : MENGUATNYA KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA TRADISIONAL</b>								
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	2,320	1,958	84.40	2,289	85.54
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	95.50	80.11	80.11	100.00	80.21	99.88
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>						<b>92.20</b>		
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA</b>								
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>						<b>N/A</b>		
<b>SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN</b>								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.10	2.05	2.14	99.96	2.00	99.96
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>						<b>99.96</b>		
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI PEGANGGURAN</b>								
5	Angka Pengangguran	Persen	2.22	3.30	7.62	98.69	3.25	98.69
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>						<b>98.69</b>		
<b>SASARAN 5 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>								
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.68	74.51	74.82	100.42	74.63	100.25
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :</b>						<b>100.42</b>		
<b>SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>								
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.69	12.90	12.70	98.45	12.96	97.99
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :</b>						<b>98.45</b>		



SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK								
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.89	78.75	96.92	123.07	80.00	121.15
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58.25	60.00	62.16	103.60	60.00	103.60
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Nindya	Utama	120	Nindya	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :						<b>115.56</b>		
SASARAN 8 : MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN								
11	Luas permukiman kumuh	Persen	23.08	20.00	31.00	155.00	33.84	91.61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :						<b>155.00</b>		
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR								
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188.90	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.68	89.50
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25		
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100.00	4	100.00
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	86,250	80,582	88,559	109.90	81,044	109.27
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	54.98	47.94	54.41	113.50	48.04	113.26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :						<b>103.91</b>		
SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.48	83.00	87.16	105.01	84.00	103.76
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB		AA	
			72.02	80.01	72.02	90.01	90.01	80.01
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :						<b>98.34</b>		
SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN								
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	3.70	3.82	103.24	4.00	95.50
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	10.03	6.60	7.90	119.70	6.80	116.18
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :						<b>111.47</b>		
SASARAN 12 : MENINGATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA								
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	30.00	100.00	22.00	62.86	100.00	62.86
		Jml LPD	30	35	22		35	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :						<b>62.86</b>		
SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL								
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.50	0.50	100.00	2.50	20.00
		Jml UM	450	600	600	100.00	750	80.00
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66.00	70.00	66.00	94.29	75.00	88.00
		Koperasi	692	734	692		787	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :						<b>97.14</b>		

SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI								
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(25.78)	1,031.38	12.5	- 206.28
		Rupiah (Dalam Milyar)	7,617	5,303	5,653	106.60	5,435	104.01
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>						<b>106.60</b>		
SASARAN 15 : MENINGKATKAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA								
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	709,536	635,329	56,302	8.86	667,086	8.44
26	Lama Tinggal Wisatawan							
	- Asing	Hari	3.14	3.15	3.15	100.00	3.16	99.68
	- Domestik	Hari	3.11	3.12	3.12	100.00	3.13	99.68
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	382,842	293,329	157,274	53.62	305,329	51.51
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>						<b>65.62</b>		
SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
28	Sampah tereduksi	Persen	26.00	28.00	27.00	96.43	30.00	90.00
29	Indeks LH	Indeks	55.240	55.000	55.720	101.309	55.240	100.869
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>						<b>98.87</b>		

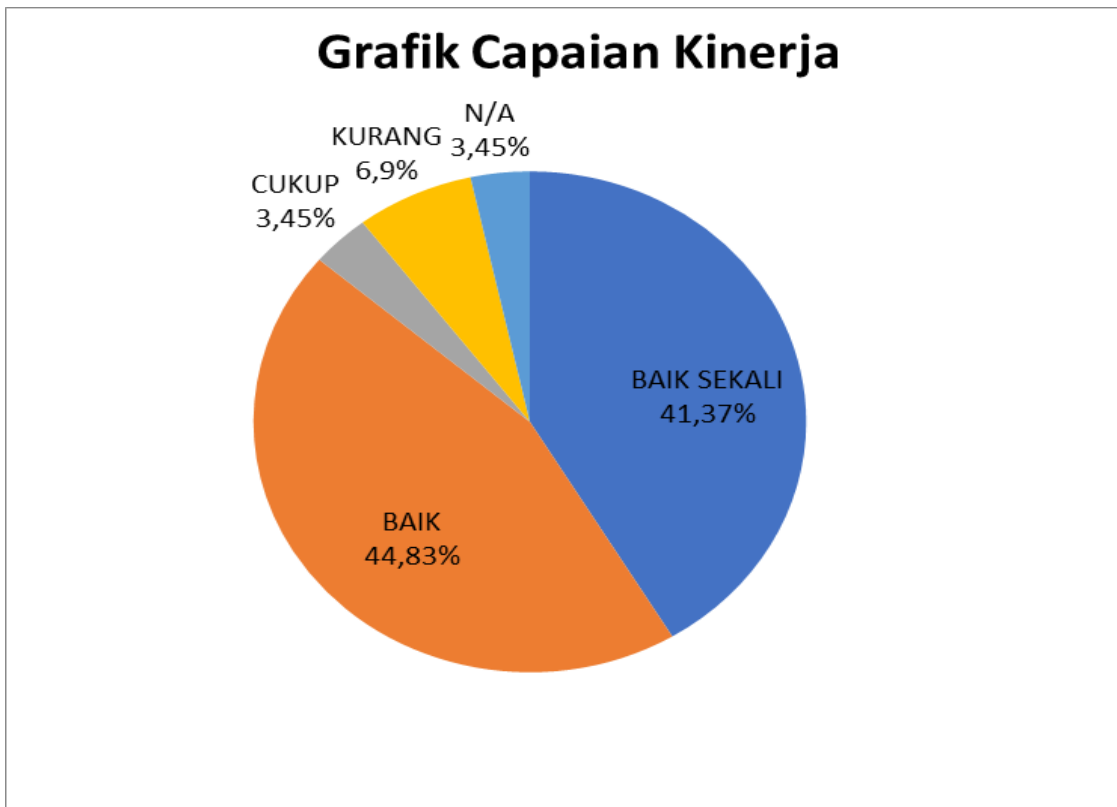
Sumber : LKjIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 menggunakan skala seperti Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja**

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.



**Gambar Grafik 3.1 Capaian Kinerja**

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sebanyak 12 (dua belas) IKU dinyatakan “Baik Sekali”, 13 (tiga belas) IKU dinyatakan “Baik”, 1 (satu) IKU dinyatakan “Cukup”, sebanyak 2 (dua) IKU dinyatakan “Kurang” dan 1 (satu) IKU belum ada nilai (N/A). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2020 termasuk dalam kategori “Baik” dengan capaian 94,07%. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian Tahun 2019, yaitu penilaian SAKIP. Dimana sampai dengan pelaporan LAKIP Tahun 2020 ini disusun, hasil penilaian belum di rilis oleh Kementerian PAN dan RB.

**B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut.



## **TUJUAN 1. MENGUATNYA JATI DIRI MASYARAKAT KOTA DENPASAR BERLANDASKAN KEBUDAYAAN BALI**

---

Untuk mewujudkan Tujuan Menguatkan Jati diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali, pada Tahun 2020 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
- b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan perikehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan dengan hal tersebut, budaya sebagai jati diri masyarakat Kota Denpasar berupaya terus dimantapkan keberadaannya sehingga di era global ini budaya di Kota Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa tercabut dari akarnya. Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

### **1) Sasaran Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional**

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 1 : Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional</b>								
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	2,320	1,958	84.40	2,289	85.54
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	95.50	80.11	80.11	100.00	80.21	99.88
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>						<b>92.20</b>		

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional yang terdiri dari 2 indikator sasaran, yaitu Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan dan Indeks Tri Hita Karana. Indikator sasaran Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan hanya sebesar 1.958 Ha, capaian Indikator ini masih sama dengan capaian di tahun 2019 dikarenakan tidak adanya laporan terkait alih fungsi lahan. Pada indikator sasaran Indeks Tri Hita Karana capaian di tahun 2020 sebesar 80,11 dengan realisasi atas target mencapai 100% walaupun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019 mengalami penurunan indeks sebesar 15,39 namun capaian di tahun 2020 telah memenuhi target atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Menguatnya Keberadaan Lembaga-lembaga Tradisional adalah sebesar 92,20% (Baik). Bila dibandingkan dengan capaian 2019 yaitu 101,32%, sasaran menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional mengalami penurunan sebesar 9,12% Yang disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sebagai akibat dari penyebaran Covid-19. Adapun kegiatan yang mengalami refocusing anggaran sebagai berikut :

1. Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerjasama di Bidang Budaya
2. Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan
3. Pembinaan Utsawa Dharma Gita

4. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum, dan peninggalan Bawah Air
6. Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam
7. Denpasar Film Festival
8. Kreativitas Seni Tradisional
9. Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah
10. Pelestarian dan Aktualisasi seni Budaya Daerah
11. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
12. Festival Budaya Daerah

Indeks Tri Hita Karana merupakan indeks spesifik daerah, Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) dan manusia dengan alam (*palemahan*), yaitu :

(a) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Parhyangan*

1. Partisipasi *krama* dalam pembangunan, penataan, dan pemeliharaan tempat suci keagamaan;
2. Partisipasi *krama* dalam pembinaan keagamaan;
3. Partisipasi *krama* dalam peningkatan kualitas aktivitas sosial keagamaan;
4. Partisipasi *krama* dalam lembaga keagamaan;
5. Partisipasi *krama* dalam mewujudkan tri kerukunan umat beragama (sesama umat beragama, antar-umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah).

(b) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Pawongan*

1. Partisipasi *krama* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Partisipasi *krama* dalam organisasi sosial kemasyarakatan;
3. Partisipasi *krama* dalam aktivitas sosial, seni, dan budaya;
4. Partisipasi *krama* dalam mendukung program-program pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan;
5. Partisipasi *krama* dalam menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian di masyarakat.

(c) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Palemahan*

1. Partisipasi *krama* dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas umum;
2. Partisipasi *krama* dalam tata ruang dan wilayah;
3. Partisipasi *krama* dalam memelihara kualitas ruang publik;
4. Partisipasi *krama* dalam menjaga kualitas tanah, air, dan udara;
5. Partisipasi *krama* dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan sekitarnya.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah adanya lembaga-lembaga kemitraan yang bersifat tradisional seperti sekaa-sekaa kesenian yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan Kebudayaan Bali. Untuk meningkatkan Indeks Tri Hita Karana dilakukan Program Pengembangan Nilai Budaya, yaitu :

- (1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- (2) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
- (3) Pengembangan nilai budaya dan keagamaan
- (4) Pembinaan *Utsawa Dharma Gita*

Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang berperan di bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan. Di tahun 2020 luasan lahan subak di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih sama dengan Tahun 2019 dikarenakan tidak adanya alih fungsi lahan.

## 2) Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Kota Denpasar.

Pelestarian dan Pengembangan budaya di Kota Denpasar Tahun 2020 dilakukan melalui 2 program dan 9 kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, kegiatannya :
  - a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
  - b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
  - c. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
  - d. Denpasar Film Festival
  - e. Kreativitas seni tradisional
  - f. Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah
  - g. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, kegiatannya :
  - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
  - b. Penyelenggaraan festival budaya daerah.

**Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA</b>								
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>						<b>N/A</b>		

Indikator sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2020 belum dapat dihitung dikarenakan belum ada yang melaksanakan pengukuran, namun Prgram dan Kegiatan untuk mendorong keberhasilan Indeks Pembanguna Kebudayaan sudah terlaksana dengan baik dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan even budaya. Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya dapat dilihat pada tabel 3.5

**Tabel 3.5 Capaian kegiatan sasaran Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya**

No	Indikator Kinerja Outcome dan Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya				
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya				
1	Jumlah peserta lomba utsawa dharmagita tingkat kota Denpasar, tingkat provinsi dan utsawa bali shanti, kemah budaya tk. kota & kemah budaya tk. provinsi, jelajah pusaka dan dewan kota pusaka	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 100 orang - 480 orang	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 100 orang - 480 orang	100

2	Pelaksanaan inventaris cagar budaya, tim ahli cagar budaya kota Denpasar, inventarisasi dan penetapan warisan budaya tak benda kota Denpasar, dan pemugaran cagar budaya gapura kuna di Pura Dalem Keheh Kesi	3 lokasi situs cagar budaya pura, 7 orang, 3 cagar budaya tak benda, 1 unit gapura kuna	3 lokasi situs cagar budaya pura, 7 orang, 3 cagar budaya tak benda, 1 unit gapura kuna	100
3	Pelaksanaan dokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, penggandaan buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur Kota Denpasar	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	100
4	Jumlah pelaksanaan kegiatan Denpasar film festival (pembinaan dan pelatihan)	105 orang siswa siswi 2 buah master DVD film dokumenter	105 orang siswa siswi 2 buah master DVD film dokumenter	100
5	Pelaksanaan sesetan heritage Omed-omedan tahun 2020 di Kota Denpasar	1STT. Satya Dharma Kerti	1 STT. Satya Dharma Kerti	100
6	Pelaksanaan Pelatihan dan pementasan kesenian wayang (pelatihan)	300 orang	300 orang	100
7	Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan sanggar, dan gugus	120 sanggar, 48 gugus	120 sanggar, 48 gugus	100
8	Pelaksanaan Festival Paruman antar OPD, Lomba Nyurat Aksara Bali, Ngewacen Aksara Bali, Nyatua Bali, Sembrama Wacana antar OPD dan Debat Mebasa Bali, Pameran Manuskrip Naskah-naskah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Bahasa Aksara dan Sastra Bali, dan Pertunjukan Tradisi Khas dan Bali Modern	PKB : 26 sekaa/grup /sanggar, PKB (kota) : 3 sekaa/grup /sanggar, FSBJ : 4 sekaa/grup /sanggar, Misi kesenian dalam daerah : 21 sekaa/grup /sanggar, Parade Gong Kebyar : 6 sekaa	PKB : 26 sekaa/grup/sanggar, PKB (kota) : 3 sekaa/grup/sanggar, FSBJ : 4 sekaa/grup/sanggar, Misi kesenian dalam daerah : 21 sekaa/grup/sanggar, Parade Gong Kebyar : 6 sekaa	100

9	Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan, lomba ngelawar, sate renteng dan meprani, lomba penjor, tari legong keraton dalam rangka HUT kota Denpasar	360 sekaa teruna 20 SMP dan 60 sekaa (3 kategori) 162 orang (siswa SD, Masyarakat, Sanggar) (3 kategori) 360 sekaa teruna 20 SMP dan 60 sekaa (3 kategori) 162 orang (siswa SD, Masyarakat, Sanggar) (3 kategori)	360 sekaa teruna 20 SMP dan 60 sekaa (3 kategori) 162 orang (siswa SD, Masyarakat, Sanggar) (3 kategori) 360 sekaa teruna 20 SMP dan 60 sekaa (3 kategori) 162 orang (siswa SD, Masyarakat, Sanggar) (3 kategori)	100
---	--	--	--	-----

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

**Tujuan 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur**

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur pada Tahun 2020 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengentaskan Kemiskinan
- b. Mengurangi Pengangguran
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- d. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
- e. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

- f. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
- g. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

### 3. Sasaran Mengentaskan Kemiskinan

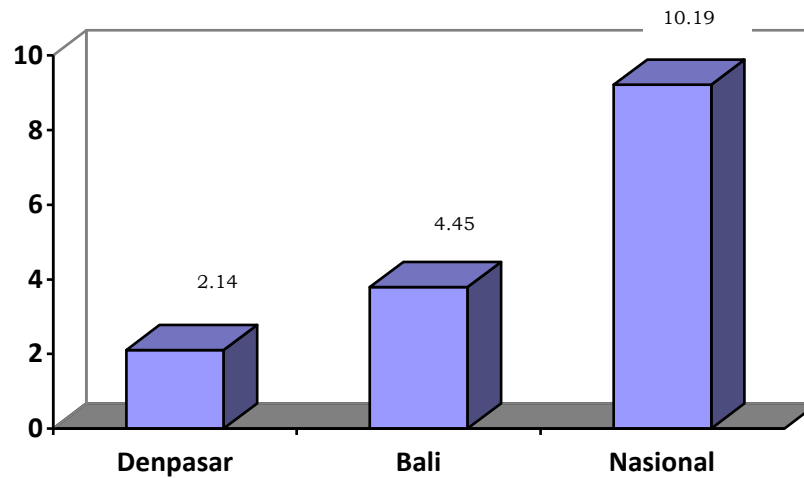
Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Mengentaskan Kemiskinan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN</b>								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.10	2.05	2.14	99.96	2.00	99.96
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>						<b>99.96</b>		

Dari Tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 2,05%, capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,96% (Baik). Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 1,41% di tahun 2020. Angka ini paling rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional, secara rinci perbandingan angka kemiskinan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik 3.2

**Gambar Grafik 3.2 Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020**

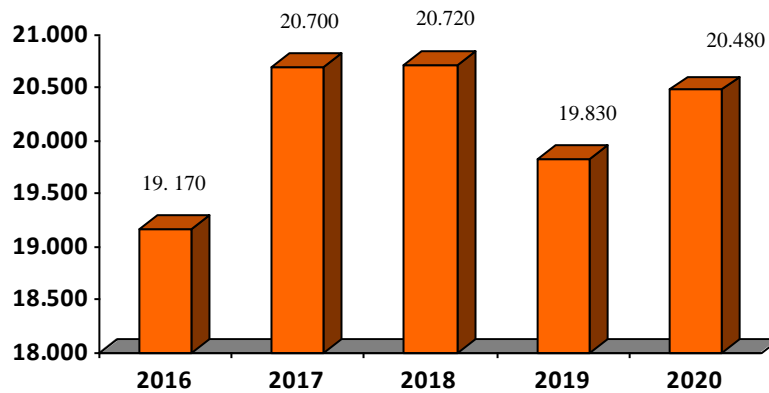


Sumber : Data diolah dari BPS Bali, 2020

Berdasarkan gambar grafik 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Angka Kemiskinan di Kota Denpasar pada Tahun 2020 dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional adalah lebih rendah. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Kemiskinan Kota Denpasar pada Tahun 2020 lebih rendah sebesar 2,31%. Sedangkan bila dibandingkan Nasional, Angka Kemiskinan Kota Denpasar lebih rendah sebesar 8,05%.

Secara kuantitas jumlah penduduk miskin Kota Denpasar per Maret 2020 mengalami kenaikan, yaitu dari 19.830 jiwa pada Maret 2019 menjadi sebanyak 20.480 jiwa atau naik menjadi sebesar 2,14%. Persentase penduduk miskin Kota Denpasar lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Bali yang sebesar 4,45%. Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada Gambar grafik.

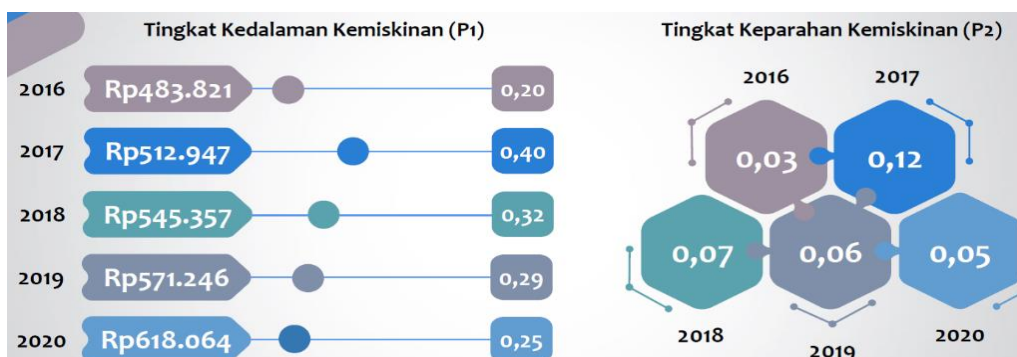
**Gambar Grafik 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Denpasar Tahun 2016 - 2020**



Sumber : Data diolah dari BPS Kota Denpasar Tahun 2020

Penyebab kemiskinan di Kota Denpasar antara lain jumlah pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di Kota Denpasar. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) yang sangat kecil ( $P1=0,25$  &  $P2=0,05$  pada Tahun 2020). Tingkat kedalaman kemiskinan mencerminkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (GK), jarak yang semakin dekat menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan mencerminkan variasi pengeluaran antara penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin kecil menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Trend Kualitas Kemiskinan Denpasar secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.4.

**Gambar 3.4 Kualitas Kemiskinan Denpasar Tahun 2016 – 2020**



Sumber : BPS Kota Denpasar Tahun 2020

Upaya dalam mengurangi kemiskinan di Kota Denpasar sudah diintegrasikan dalam bentuk sinergitas antar Perangkat Daerah terkait melalui inovasi Kota Tangguh Sosial. Kota Tangguh Sosial mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial, dimana Daerah Tangguh Sosial adalah Daerah yang melalui berbagai program inovasi sehingga memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman masalah kesejahteraan sosial, dan mampu melakukan mitigasi dengan segera dari dampak masalah kesejahteraan sosial yang merugikan.

Penyelenggaraan Daerah Tangguh Sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggara Layanan Daerah Tangguh Sosial meliputi *Customer Service* Layanan Tangguh Sosial, Pelaksana SLRT Daerah Cemerlang dan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik terkait masalah kesejahteraan sosial. Jenis layanan Daerah Tangguh Sosial berdasarkan ruang lingkupnya meliputi Layanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial.

## **5) Sasaran Mengurangi Pengangguran**

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Capaian sasaran kinerja Mengurangi Pengangguran pada Tahun 2020, ditampilkan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Mengurangi Pengangguran**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI PEGANGGURAN</b>								
5	Angka Pengangguran	Persen	2.22	3.30	7.62	98.69	3.25	98.69
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>						<b>98.69</b>		

Capaian Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran dengan Indikator Sasaran Angka Pengangguran, dihitung berdasarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tabel capaian diatas, angka pengangguran Kota Denpasar Tahun 2020 meningkat 5,4% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian indikator angka pengangguran di tahun 2020 adalah sebesar 98,69% (Baik). Secara rinci Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

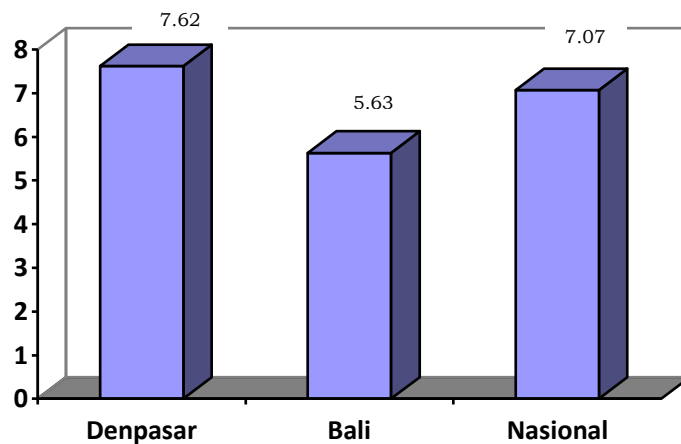
**Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota 2020**

Kabupaten/Kota	TPT (%)		TPAK (%)	
	2019	2020	2019	2020
Kab. Jembrana	1.42	4.52	67.52	75.92
Kab. Tabanan	1.28	4.21	75.56	75.47
Kab. Badung	0.38	6.92	72.67	72.69
Kab. Gianyar	1.42	7.53	76.21	71.27
Kab. Klungkung	1.54	5.42	76.21	75.27
Kab. Bangli	0.72	1.86	83.20	82.20
Kab. Karangasem	0.60	2.42	80.68	80.75
Kab. Buleleng	3.02	5.19	69.67	75.07
Kota Denpasar	2.22	7.62	71.71	70.91
<b>Bali</b>	<b>1.37</b>	<b>5.63</b>	<b>76.78</b>	<b>74.32</b>

Sumber : BPS Bali 2020

Angka Pengangguran di Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 0,55% dari Angka Pengangguran Nasional. Sedangkan, bila dibandingkan dengan Angka Pengangguran Provinsi Bali, terlihat bahwa Angka Pengangguran Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 1,99% dari Provinsi Bali. Angka pengangguran Kota Denpasar berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kabupaten Buleleng yang Angka Penganggurannya 3,02%. Perbandingan Angka Pengangguran Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar grafik 3.5

**Gambar Grafik 3.5 Perbandingan Angka Pengangguran Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020**



Sumber : BPS, 2020

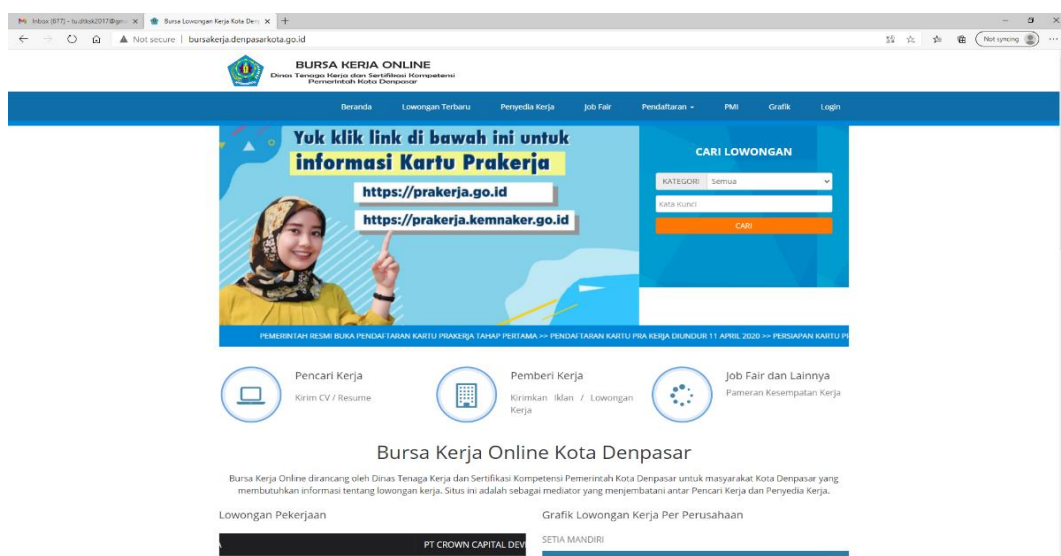
Tingginya angka pengangguran di kota Denpasar Tahun 2020 dikarenakan oleh :

1. Terjadinya Penutupan 406 perusahaan karena Pandemi  
 PHK : 918 orang  
 Dirumahkan : 12.950 orang
2. Meningkatnya Tenaga Kerja Tidak Berkompeten dan Tidak Bersertifikasi
3. Perluasan Kesempatan Kerja Rendah
4. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Belum Memadai

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dengan biaya murah, mudah dan cepat. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Portal atau Website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhubung dengan Sistem Informasi Kartu Pencari Kerja AK/I (Kartu Kuning). Berdasarkan Database AK/1 sampai bulan desember 2020 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 237 orang yang terdiri dari 147 laki – laki dan 90 perempuan. Dari 237 orang pencari kerja sebanyak 78 orang sudah ditempatkan (41 laki – laki dan 37 perempuan). Jadi persentase penempatan sebesar 32,91%.

**Gambar 3.6 Bursa kerja Online (BKOL) Berbasis User**



Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- b. Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
- c. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
- d. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja

## 5) Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran kemampuan/Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

**Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 5 :MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>								
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.68	74.51	74.82	100.42	74.63	100.25
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :</b>						<b>100.42</b>		

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 74,82 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu:

- a. Sudah terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar
- b. Anggaran Kesehatan perkapita pertahun di Kota Denpasar sudah cukup tinggi
- c. Anggaran Kesehatan sudah lebih dari 10% dari total APBD Kota Denpasar sesuai amanat Undang-undang.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Denpasar berada diatas capaian angka harapan hidup Provinsi Bali dan Nasional. Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2020 mencapai 74,82 Tahun. Pada Tahun 2020 di targetkan sebesar 74,51 Tahun, dapat terealisasi sebesar 100,42% (Baik Sekali). Data harapan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada table 3. 10.

**Tabel 3.10 Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2018-2020 menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2020	2019	2018
Kab. Jembrana	72,35	72,21	71,91
Kab. Tabanan	73,65	73,53	73,23
Kab. Badung	75,10	74,99	74,71
Kab. Gianyar	73,68	73,56	73,26
Kab. Klungkung	71,25	71,06	70,70
Kab. Bangli	70,52	70,37	70,05
Kab. Karangasem	70,47	70,35	70,05
Kab. Buleleng	71,83	71,68	71,36
Kota Denpasar	74,82	74,68	74,38
Provinsi Bali	72,13	71,99	71,68

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Umur Harapan Hidup Kota Denpasar adalah paling tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bali, dimana Kabupaten Karangasem memiliki Umur Harapan Hidup terendah yaitu 70,47 tahun.

## **6) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Untuk mendukung kesuksesan pembangunan di suatu Daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pendidikan yang unggul dan bermutu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia, Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Sehubungan dengan penetapan Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi indikator sasaran dalam RPJMD Kota Denpasar 2016 – 2021 maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam mendukung tercapainya Indikator sasaran IPM tersebut dari sisi Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan yaitu perbandingan angka Rata – rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Hasil Analisis pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat pada Tahun 2020 terlihat seperti Tabel 3. 11.

**Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>								
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.69	12.90	12.70	98.45	12.96	97.99
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :</b>						<b>98.45</b>		

Indeks Pendidikan pada Tahun 2020 adalah 12,70. Realisasi Tahun 2020 meningkat dibandingkan Tahun 2019 dimana Indeks Pendidikan Tahun 2019 adalah 12,69. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dilihat dari Indeks Pendidikan Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 dengan capaian tahun 2020 sebesar 98,45% (Baik). Adapun indikator pendukung capaian indeks pendidikan tersebut tercantum pada tabel 3. 12.

**Tabel 3.12 Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2020	Persentase Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	12,70	12,70	100	Sangat Baik
		a. Angka Rata - Rata Lama Sekolah	%	11,35	11,39	100.35	Sangat Baik
		b. Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,00	14,01	100.07	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	75,5	100	132,45	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	%	103,50	100,57	97,16	Sangat Baik
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	98	92,41	94,29	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	%	103,41	97,71	94,40	Sangat Baik

		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	93	84,02	90,34	Sangat Baik
		Angka Melek Huruf	%	98.05	99,35	101.33	Sangat Baik
		Rasio Guru dan Murid :					
		a. SD/MI/Paket A	%	21	21	100	Sangat Baik
		b. SMP/MTs/Paket B	%	21	21	100	Sangat Baik
		Fasilitas Pendidikan :					
		a. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	247	248	100.40	Sangat Baik
		b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	74	75	101.35	Sangat Baik
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda	%	94	-	-	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19
		Terlaksananya kreativitas di kalangan Remaja	%	96	-	-	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19
		Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional	%	100	-	-	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Peringkat dalam kegiatan Olahraga Provinsi	%	Peringkat dalam kegiatan olahraga provinsi	-	-	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19
		a. Perolehan Medali Emas	%	200	-	-	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2020

Bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pendidikan Tahun 2019 maka dapat dilihat bahwa, angka melek huruf Tahun 2020 adalah 99,30% yang berarti bahwa 99,30% penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program

pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar Tahun 2020 sebesar 11,39%, capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan Kemendikbud tahun 2020 yaitu 8,7%. Komponen Harapan Lama Sekolah juga sudah menunjukkan pencapaian dengan sangat baik dengan Capaian 14,01 % mampu memenuhi target yang ditetapkan Kemendikbud Tahun 2020 yaitu 13,2%. Komponen lain dalam kaitan Peningkatan Mutu Pendidikan sudah menunjukkan pencapaian yang sangat Baik diantaranya; Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 Tahun sebesar 99,51 persen, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 Tahun sebesar 99,23 persen dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 Tahun sebesar 75,47 persen. Secara rinci dapat diuraikan pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13 Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2018-2020**

No	Uraian	2018	2019	2020
1	2	4	5	6
1	Angka Melek Huruf (persen)	98.68	99.30	99.00
	- Laki-Laki	99.1	99.67	99.46
	- Perempuan	96.88	98.93	98.52
2	Rata-rata Lama Sekolah (persen)	11.20	11.23	11,39
3	Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
	7 – 12 Tahun	99.62	100	99.51
	13 – 15 Tahun	99.17	98.42	99.23
	16 – 18 Tahun	73.1	73.74	75.47

Sumber :BPS Kota Denpasar, 2020 (data diolah)

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Kab. Jembrana	97,24	98,48	97,07	93,36	92,40	89,21	95,26	95,40	93,08
Kab. Tabanan	96,49	97,84	97,28	89,99	92,12	89,49	93,19	94,93	93,32
Kab. Badung	99,34	99,90	98,35	95,96	99,71	95,25	97,71	99,81	96,81
Kab. Gianyar	96,88	98,00	96,28	93,81	91,00	88,38	95,36	94,00	92,35
Kab. Klungkung	94,74	93,29	93,25	88,52	82,58	80,69	91,57	87,81	86,82
Kab. Bangli	92,48	95,06	93,33	88,35	82,98	81,47	90,43	89,06	87,43
Kab. Karangasem	93,12	91,13	90,75	85,06	78,97	79,16	89,05	85,01	84,91
Kab. Buleleng	95,65	96,22	95,64	88,70	86,71	86,08	92,13	91,40	90,80
Kota Denpasar	99,46	99,67	99,10	98,52	98,93	96,88	99,00	99,31	98,02
Provinsi Bali	96,99	97,38	96,49	92,59	91,66	89,48	94,80	94,53	92,98

Sumber: BPS Bali, 2020

Pengalokasian dan realisasi anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.480.345.809,60 terealisasi Rp. 137.213.141.795,72 yang dialokasikan pada 8 (Delapan) Program dengan 28 kegiatan untuk peningkatan mutu Pendidikan diantaranya; program peningkatan kapasitas SDA, Program Pendidikan Usia Dini, Program Wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun, Program Pendidikan Menengah, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam upaya peningkatan peran pemuda dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Serta pada upaya peningkatan prestasi Olahraga dialokasikan anggaran pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan program peningkatan sarana prasarana olahraga.

## 7) Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakan hak asasi manusia, penegakan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan

sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang. Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Isu kesetaraan gender di Kota Denpasar antara lain:

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT
3. Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KB

Kebijakan pembangunan gender di Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi partai politik, advokasi organisasi perempuan dan Pelatihan pendidikan politik perempuan.
2. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi pelatihan di bidang ekonomi.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait, koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengembangan KIE, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, serta pencatatan data kekerasan/kasus perempuan dan/atau anak.
4. Penguatan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan layanan kualitas keluarga melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan, koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020 dirinci pada Tabel 3.14.

**Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.89	78.75	96.92	123.07	80.00	121.15
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58.25	60.00	62.16	103.60	60.00	103.60
10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Nindya	Utama	120	Nindya	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :</b>						<b>115.56</b>		

Dari Tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender Data IPG tahun 2019 realisasi 96,89 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 78,50, sedangkan IPG tahun 2020 Target 78,75 realisasi 96,92. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Sedangkan IPM Kota Denpasar adalah 83,93 menduduki peringkat tertinggi dibandingkan seluruh abupaten/Kota di Bali. Ini menunjukkan bahwa tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Denpasar diikuti dengan capaian kesetaraan gendernya, tingginya pembangunan manusia yang

dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang diperoleh juga.

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dari target IDG 60 % realisasi 62,16 ini dapat dilihat sudah ada peningkatan partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam pemilu tahun 2020 di Kota Denpasar ada 4 (empat) Orang yang berhasil menjadi anggota Dewan Perempuan.

Kota Denpasar dalam Evaluasi Kota Layak Anak di tahun 2016 mendapat katagori Nindya dimana hanya 3 Kota yang berhak mendapatkan kategori tersebut yakni : Kota Denpasar, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta . Kota Denpasar s/d tahun 2018 bertahan di katogori Nindya di tahun 2019 kota denpasar mendapat katagori Utama hingga tahun 2020.

Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melaksanakan salah satu kegiatan inovasi yaitu membentuk PATBM (Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Desa/Kelurahan. penguatan dan pengembangan layanan peningkatan kualitas anak di sekolah (SRA), Puskesmas Ramah Anak, Sarana Prasarana anak di lingkungan masyarakat, pemenuhan hak anak berbasis masyarakat serta mendorong partisipasi anak dalam semua kegiatan.

## **8. Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan**

Berdasarkan SK Walikota Denpasar Kota Denpasar Nomor 188.45/845/HK/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa total luas kawasan kumuh di Kota Denpasar sampai dengan akhir tahun 2019 adalah seluas **82,6076 Ha** yang tersebar di 4 Kecamatan. Dari Total luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Denpasar tersebut, yang menjadi kewenangan Kota Denpasar untuk menanganinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah seluas **23,8448 Ha**. Akan tetapi berdasarkan SK

Walikota Denpasar Kota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, luas kawasan kumuh di Kota Denpasar berkurang menjadi **50,52 Ha**, dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota menjadi tersisa **7,72 Ha**. Analisis Pencapaian Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 8 : MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN</b>								
11	Luas permukiman kumuh	Persen	23.08	20.00	31.00	155.00	33.84	91.61
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :</b>						<b>155.00</b>		

Pengurangan luasan kawasan kumuh tersebut disebabkan karena adanya regulasi baru, yaitu Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yang mengganti Permen PU No 2 Tahun 2016, dimana dalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 ini di dalamnya salah satunya mengatur tentang perubahan indikator kawasan kumuh dari semula 19 indikator suatu daerah termasuk kedalam kriteria kawasan kumuh, berubah menjadi 16 indikator. Hal ini yang menyebabkan total luas kawasan kumuh di Kota Denpasar berkurang sebanyak 32, 0876 Ha. dari semula 82,6076 menjadi 50,52 Ha. Untuk lebih detilnya ditampilkan dalam tabel 3.16.

**Tabel 3.16 Data Pengurangan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Tahun 2020**

NO	DESA/KEL	Nama Basis	Luas RTRW/Link. /Banjar/Dusun Kumuh (Ha)	NILAI KUMUH AKHIR 2019	TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR 2019	NILAI KUMUH AKHIR 2020	TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR 2020	SISA KUMUH SK 2020 (Ha)
1	DAUH PURI KAUH	JEMATANG	3,7840	32	KUMUH RINGAN	25	KUMUH RINGAN	3,780
2	DAUH PURI KAUH	SUMUH	0,3906	18	TIDAK KUMUH	15	TIDAK KUMUH	
3	DAUH PURI	CATUR PANCA	0,8349	36	KUMUH RINGAN	23	KUMUH RINGAN	0,140
4	PEMECUTAN	KERANDAN	0,2800	28	KUMUH RINGAN	21	KUMUH RINGAN	0,280
5	TEGAL HARUM	BUANA KUBU	0,2300	25	KUMUH RINGAN	13	TIDAK KUMUH	
6	PEDUNGAN	SAWAH	2,2130	10	TIDAK KUMUH	6	TIDAK KUMUH	
7	SANUR KAUH	MEDURA	0,6377	19	KUMUH RINGAN	14	TIDAK KUMUH	
8	SANUR KAJA	BATAN POH	0,5834	36	KUMUH RINGAN	27	KUMUH RINGAN	0,580
9	KESIMAN PETILAN	KEDATON	7,1317	19	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
10	KESIMAN KERTALANGU	TOHPATI	1,1300	20	KUMUH RINGAN	16	KUMUH RINGAN	0,620
11	SUMERTA	ABIAN KAPAS KELOD	0,4500	10	TIDAK KUMUH	10	TIDAK KUMUH	
12	SUMERTA KAJA	LEBAH	1,5700	21	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
13	PEMECUTAN KAJA	PANTI GEDE	0,5200	19	KUMUH RINGAN	17	KUMUH RINGAN	0,520
14	PEMECUTAN KAJA	SEMILAJATI	2,8400	11	TIDAK KUMUH	5	TIDAK KUMUH	
15	PEMECUTAN KAJA	MARGA JATI	0,9400	31	KUMUH RINGAN	23	KUMUH RINGAN	0,680
16	PEMECUTAN KAJA	BELONG MENAK	1,1260	37	KUMUH RINGAN	22	KUMUH RINGAN	1,120
17	DAUH PURI KAJA	TERUNA SARI	0,6440	20	KUMUH RINGAN	12	TIDAK KUMUH	
18	DAUH PURI KAJA	LUMINTANG	1,9668	24	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
19	DAUH PURI KAJA	WANASARI	11,3807	31	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
20	DAUH PURI KAJA	WANGAYA KAJA	0,6140	19	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
21	UBUNG KAJA	PETANGAN GEDE	5,9767	19	KUMUH RINGAN	16	KUMUH RINGAN	5,978
22	UBUNG KAJA	PEMANGKALAN	11,6216	22	KUMUH RINGAN	16	KUMUH RINGAN	11,622
23	DANGIN PURI KANGIN	KERTABUANA	0,6055	24	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	
24	PEDUNGAN	PESANGGARAN	25,2000	48	KUMUH SEDANG	39	KUMUH SEDANG	25,200

25	PEGUYANGAN	PRAJASARI	1,6300	9	TIDAK KUMUH	9	TIDAK KUMUH
<b>Luas Total</b>			<b>82,6706</b>				<b>50,520</b>
Kewenangan Pusat			58,8258				42,8000
Kewenangan Pemkot			23,8448				7,7200

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Denpasar

Pada tahun 2020 juga diadakan penataan ulang (verifikasi lapangan) dengan tujuan untuk memastikan deliniasi kawasan kumuh terbaru di Kota Denpasar. Dari hasil penataan ulang ini ternyata ada beberapa di daerah di Kota Denpasar yang dahulunya dimasukkan ke dalam kawasan kumuh setelah dilakukan verifikasi tidak lagi termasuk kedalam kriteria kawasan kumuh. (misalnya ada suatu daerah yang dahulunya termasuk kedalam kawasan kumuh, setelah dilakukan verifikasi ulang ternyata kawasan tersebut adalah kawasan persawahan, dll nya)

Pada tahun ini juga walaupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tidak menganggarkan untuk melakukan penataan kawasan kumuh yang disebabkan karena adanya refocusing anggaran sebagai akibat adanya wabah pandemi virus covid-19, akan tetapi beberapa desa/kelurahan di Kota Denpasar masih tetap melakukan penataan daerahnya untuk menangani kawasan kumuh yang terdapat di daerah mereka melalui dana APBDes mereka. Hal ini mampu mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Denpasar.

Total luas kawasan kumuh yang berhasil dihilangkan adalah seluas 16,125 Ha. Sehingga luas kawasan kumuh di Kota Denpasar (yang penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar – sesuai UU No 23 Tahun 2014) telah berkurang dari semula 23,8448 Ha menjadi tersisa 7,720 Ha.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya jumlah luasan kawasan kumuh di Kota Denpasar pada Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Adanya perubahan regulasi peraturan yaitu dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018. Ada hal yang signifikan terkait regulasi ini dimana adanya pengurangan kriteria indikator

kawasan kumuh yang semula terdiri dari 19 indikator menjadi 16 indikator. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kawasan yang dahulu termasuk ke dalam wilayah kawasan kumuh menjadi tidak lagi kawasan kumuh.

2. Adanya penataan ulang (verifikasi lapangan) untuk memastikan luasan deliniasi kawasan kumuh terbaru di Kota Denpasar. Dari hasil penataan ulang ini ada beberapa kawasan yang dahulunya masuk kedalam kriteria kawasan kumuh setelah dilakukan verifikasi ulang berubah tidak lagi masuk kedalam kriteria kawasan kumuh .
3. Adanya intervensi dari pihak desa/kelurahan untuk melakukan penataan kawasan kumuh di daerah masing-masing dengan menggunakan dana APBDes mereka.

Ada beberapa Program yang mendukung pencapaian sasaran mengurangi permukiman kumuh perkotaan, yaitu :

**1. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

Program ini di dukung dengan kegiatan – kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang**

Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan komponen kegiatan yang terintegrasi dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan hasil penyelesaian kegiatan terdiri dari :

Perencanaan	: 6 Pekerjaan
Fisik	: 10 Pekerjaan
Pengawasan	: 5 Pekerjaan

Untuk realisasi keuangan, terdapat beberapa kendala dalam pencairannya sehingga tidak dapat dipenuhi 100%. Realisasi keuangan untuk beberapa pekerjaan di dalamnya belum dapat diselesaikan atau mencapai progress 100% dikarenakan adanya kekurangan administrasi dalam pencairan keuangannya sehingga pencairannya akan diluncurkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi fisik ada 1 pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh aturan/ketentuan yang melarang penerima hibah untuk menerima bantuan secara berturut-turut.

Berikut pekerjaan yang belum mencapai realisasi 100% fisik/keuangannya per Desember 2020 : Renovasi Bale Banjar Celagi Gendong, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar

- Pengawasan Renovasi Bale Banjar Celagi Gendong, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat
- Pekerjaan Ornamen dan Utilitas di Banjar Celagi Gendong
- Pekerjaan Pembangunan Bale Pesantian dan Tetaring Permanen Pura Civagina pada Pengadilan Negeri Denpasar
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Bale Pesantian dan Tetaring Permanen Pura Civagina pada Pengadilan Negeri Denpasar.

#### **b. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar**

Pada tahun 2020, pekerjaan fisik pada kegiatan penataan kawasan kumuh tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran. Pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar hanya berupa pembuatan dokumen perencanaan DED (*Detail Engineering Design*) untuk penataan kawasan kumuh di permukiman TPA Suwung.

**Gambar 3.7 Rapat pembahasan awal penyusunan DED Kawasan Pesanggaran Suwung terkait penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar**



**c. Kegiatan Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar sehingga nantinya akan dapat meminimalisir berkembangnya permukiman kumuh di Kota Denpasar.

Tahun 2020 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran di Pemerintah Kota Denpasar.

**d. Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP)**

Pada Tahun 2020 pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah pembuatan draft Peraturan Walikota Denpasar tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP) yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan Peraturan Walikota tentang RP2KPKP. Draft Perwali ini didalamnya mencakup pencegahan serta peningkatan kawasan kumuh yang akan dijadikan prioritas untuk penanganan yang akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

**Gambar 3.8 Rapat penyusunan drat Peraturan Walikota tentang RP2KPKPK**



## **2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**

Program Pengelolaan Areal Pemakaman di dukung dengan kegiatan :

### **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.**

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dengan hasil penyelesaian kegiatan terdiri dari 2 Dokumen Perencanaan (DED) yaitu:

- DED Penataan Areal Petunon/Setra Desa Pekraman Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan
- DED Pembangunan Tempat Pengabenen Setra Agung Badung (Setra Badung) Desa Adat Denpasar.

Pekerjaan tersebut diatas dapat diselesaikan dengan baik sehingga realisasi fisik dan keuangan yang dicapai per Desember 2020 adalah 100% secara keseluruhan.

## **3. Program Pengembangan Estetika Kota**

### **Kegiatan Penataan Taman**

Pada Tahun 2020 kegiatan Penataan Taman melaksanakan kegiatan fisik berupa pembuatan pos jaga yang terletak di Taman Janggan untuk mendukung tercapainya fungsi dari taman yang sudah ada (pada ruang bermain ramah anak). Kegiatan Penataan Taman tetap dilaksanakan pada taman-taman yang belum tertata dengan rapi dengan memaksimalkan hasil pembibitan swakelola.

### **a. Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Estetika Kota**

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan untuk tetap menjaga dan memelihara sarana dan prasarana taman- taman di Kota Denpasar. Inovasi kegiatan pada tahun 2020 menerapkan konsep manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) secara optimal. Manajemen sumber daya manusia (tenaga tim teknisi) dioptimalkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran sehingga semua sarana prasarana tetap dapat berfungsi dan mendukung estetika kota.

## **b. Pembibitan Tanaman**

Kegiatan ini berupa pengadaan tanaman untuk penyulaman penambahan vegetasi tanaman di taman - taman yang ada di seluruh Kota Denpasar. Inovasi yang dilakukan tahun 2020 adalah melakukan pembibitan swakelola dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (sumber daya manusia, sumber daya material dan peralatan, serta tersedianya tempat pembibitan). Hasil pembibitan swakelola dapat mendukung penataan taman dan penyulaman taman- taman di Kota Denpasar.

## **9) Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur**

Kota Denpasar tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan dimana Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam upaya mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing yaitu melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi ;peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar, penerbitan Rekomendasi Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar, serta tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang infrastruktur/fasilitas Wilayah ada pada lingkungan internal (weakneses) dan external (threat). Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur, kemampuan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja PD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan internal, instansi terkait dan para stakeholder, mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan efisiensi waktu, dan biaya serta meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektifitas sarana dan prasarana kerja.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada :

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan kota

2. Meningkatkan kualitas dan dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat
3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Kota Denpasar pada Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>								
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188.90	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.68	89.50
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25		
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100.00	4	100.00
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	86,250	80,582	88,559	109.90	81,044	109.27
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	54.98	47.94	54.41	113.50	48.04	113.26
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :</b>						<b>103.91</b>		

Dari Tabel 3.17 di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator sudah melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 103,91% (Baik sekali). Bila dibandingkan rata-rata capaian Tahun 2019 yang sebesar 127,11% maka rata-rata capaian Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,2% dari Tahun 2019.

Kualitas jalan yang baik di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat komuter yang menuju/melintasi Kota Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik. Jalan kondisi tidak baik menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Realisasi jalan kondisi baik pada Tahun 2019 adalah 79,52% atau sepanjang 385,188.90 m mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 61.66% atau sepanjang 299.704,70 m. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19*.

Secara bertahap persentase kondisi jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik diharapkan

akan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

**Gambar 3.9 Pembentukan Badan Jalan Menggunakan Limestone di Jalan Tukad Pekaseh Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan**



Penanganan daerah rawan genangan/banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah pemukiman masyarakat dan adanya pengalihan fungsi lahan. Namun demikian Pemerintah Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir. Keterbatasan dana mengharuskan memilih prioritas dalam penanganannya. Pencapaian pengurangan titik genangan sebesar 82,39% sehingga titik genangan yang belum tuntas 4 titik sebesar 17,61% yaitu :

1. Kawasan Bumi Ayu, Penyaringan Kutat Lestari
2. Jl. A. Yani Denpasar Utara
3. Kecubung, Hayam Wuruk
4. Kerta Pura

Rumah Tangga Terakses Jaringan Sanitasi (SR) di Kota Denpasar pada Tahun 2020 adalah 6,51% dengan penduduk yang terlayani sebesar 62.418 orang, dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 10.403 SR. Jaringan Sanitasi disini adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Terpusat Skala Kota dan Skala Komunal (Sanimas). Penyebab dari rendahnya presentase Rumah Tangga Terakses Jaringan Sanitasi (SR) di Kota Denpasar adalah :

- a. Prilaku Masyarakat yang masih membuang air limbah domestik ke dalam tanah dan ke dalam sungai
- b. Pembangunan Jaringan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik yang belum maksimal
- c. Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal
- d. Rasionalisasi (refokusing) Anggaran Tahun 2020 kegiatan sanitasi Air Limbah untuk Penanganan Pandemi Covid-19

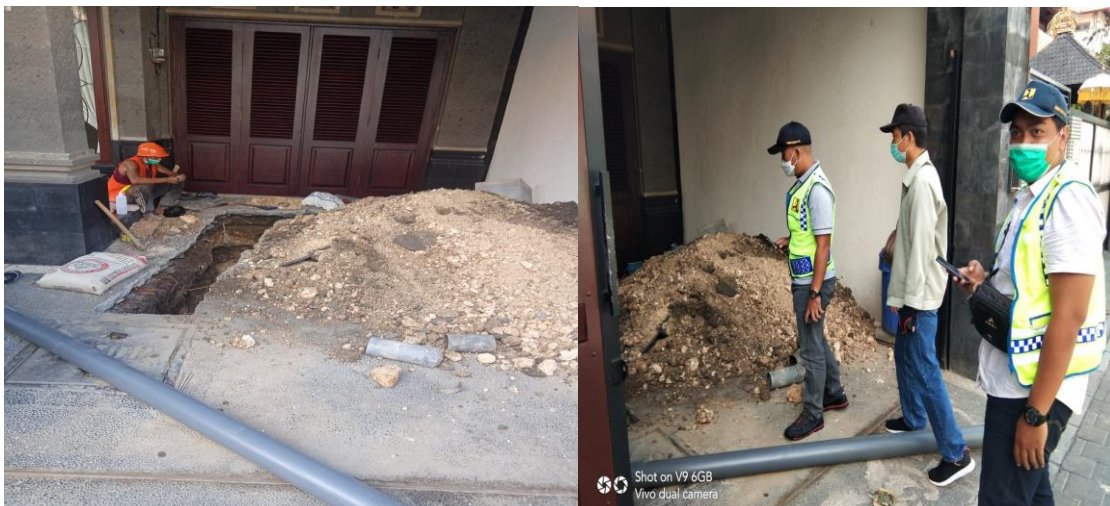
Langkah – langkah yang dilakukan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mencapai IKU yang sesuai dengan tujuan SDGs pada tahun 2030 yaitu 100% Sanitasi Layak melalui IPAL Domesti Terpusat adalah :

1. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya prilaku hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah rumah tangga ke pengolahan air limbah domestik
2. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementrian dalam pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik
3. Mengarahkan Pemasangan Sambungan Rumah DSDP kepada masyarakat dalam mensiasati lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Komunal
4. Mengusulkan kegiatan yang terkena rasionalisasi (*refocussing*) di tahun 2021

**Gambar 3.10 Pemeliharaan IPAL Komunal di Kota Denpasar**



**Gambar 3.11 Pembuatan Pipa Sambungan Rumah DSDP di Desa Pemogan dan sekitarnya Kec. Denpasar Selatan**



Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi di Kota Denpasar pada Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,57% dengan penduduk yang terlayani di Tahun 2020 sebesar 62.418 orang, dan jumlah sambungan rumah sebanyak 10.403 SR. Air bersih terlindungi disini adalah air melalui Jaringan Pipa distribusi yang dikelola oleh PDAM Kota Denpasar. Penyebab dari rendahnya presentase penduduk yang memanfaatkan air bersih terlindungi melalui jaringan perpipaan di Kota Denpasar adalah :

- a. Air baku yang masih kurang, ini dikarenakan Kota Denpasar hanya mengandalkan pasokan Air baku untuk air bersih melalui Sungai Ayung dan Sumur Bor PDAM, sehingga cakupan pelayanan air bersih di kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Selatan masih rendah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Perpipaan Air Bersih yang belum maksimal karena dana untuk pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dari APBN dan APBD sangat rendah setiap tahunnya.
- c. Prilaku masyarakat yang masih nyaman menggunakan air bawah tanah atau sumur tidak terlindungi.
- d. Rasionalisasi (*recofusing*) Anggaran Tahun 2020 kegiatan air bersih untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Langkah – langkah yang dilakukan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mencapai IKU yang sesuai dengan tujuan SDGs pada tahun 2030 yaitu 100% Air Minum Layak melalui Jaringan Perpipaan Terlindungi adalah:

1. Mengoptimalkan Air Baku dari SPAM SARBAGITA Penet (Badung) untuk memenuhi cakupan pelayanan air baku di Kecamatan Denpasar Barat dan SPAM SARBAGITA Petanu (Gianyar) untuk memenuhi cakupan pelayanan air baku di Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Lebih mengintensifkan pendanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum melalui dana APBD sebagai penyokong dana APBN dari kementerian PUPR dalam pembangunan Infrastruktur Jaringan Perpipaan Air Bersih.
3. Sosialisasi terus menerus terhadap masyarakat terhadap pentingnya prilaku hidup sehat dan bersih dengan tidak menggunakan air sumur dangkal yang tidak terlindungi dan beralih ke jaringan pipa terlindungi.
4. Mengusulkan kegiatan yang terkena rasionalisasi (*recofusing*) di tahun 2021

### **Tujuan 3. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)**

---

#### **10) Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel**

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan.

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam Tahun 2020 ditetapkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

**Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL</b>								
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,48	83,00	87,16	105,01	84,00	103,76
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB		AA	
			72,02	80,01	72,02	90,01	90,01	80,01
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :</b>						<b>98,34</b>		

Dari Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel realisasinya telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 98,34% (Baik), jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Tahun 2019 sebesar 98,49% (Baik) maka mengalami penurunan sebesar 0,15%. Penurunan ini disebabkan capaian SAKIP Tahun 2020 belum diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga masih menggunakan data capaian Tahun 2019.

Inovasi yang di lakukan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu menciptakan *Sang Sewakadarma* agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja *Sewakadarma*. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mengandung arti bahwa pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. *Sang Sewakadarma* memiliki peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung yang dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sejak dibangunnya inovasi *Sang Sewakadarma* pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 10 orang agen perubahan yang di sebut dengan *Sang Sewakadarma* dengan kategori 4 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, dan 6 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Utama. Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 19 orang *Sang Sewakadarma*, dengan kategori 2 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, 12 orang *Sang Sewakadarma* Utama, 4 orang *Sang Sewakadarma* Madya dan 1 orang kategori *Sang Sewakadarma* Pratama. Dan di Tahun 2020 jumlah Agen Perubahan Kota Denpasar mengalami peningkatan dengan jumlah 13 orang *Sang Sewakadarma* dengan kategori Mahotama sebanyak 8 orang, kategori Utama sebanyak 3 orang dan kategori Madya sebanyak 2 orang.

Terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Investasi, Kependudukan dan Kategori Perangkat Daerah Lainnya. Nilai rata-rata SKM Tahun 2020 adalah 87,16 dimana berdasarkan interval kepuasan masyarakat nilai tersebut masuk ke dalam kategori kinerja unit pelayanan baik (B).

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2020 kembali menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 7 (tujuh) kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena atas hasil pemeriksaan keuangan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2020 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar pada Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementrian PAN dan RB, untuk itu pada LKjIP Tahun 2020 ini kami menggunakan hasil Tahun 2019 yang memperoleh nilai sebesar 72,02 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota

Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk mencapai indikator sasaran yaitu meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Denpasar pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, Bappeda Kota Denpasar telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,98%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja telah mencapai 98,34% dengan penyerapan anggarannya sebesar 94,36%. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah tertuang dalam rekomendasi dari Kementerian PAN & RB kepada Walikota Denpasar untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ke depan.

Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2017. Didalam Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya didalam penyelarasan penjabaran indikator kinerja utama sampai ke level eselon IV dilakukan perubahan mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana sebelum Forum Perangkat Daerah dilakukan dengan acara seremonial, sekarang dilakukan dengan presentasi masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah memaparkan keselarasan IKU Daerah ke IKU Perangkat Daerah. Selain dari mengubah mekanisme perencanaan, juga telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan mendatangkan narasumber baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Pusat.

Untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai SAKIP, Pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sehingga perencanaan kinerja dan indikator kinerja dapat berorientasi pada hasil (merapikan/membenahi pohon kinerja dan *cascade* PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan dengan prioritas untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja dengan integrasi system perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020, dilakukan juga produk inovasi antara lain :

1. POKIR (Pokok-Pokok Pikiran Dewan)



**Gambar 3.12 Sistem e-Pokir**

Pokir merupakan Pokok-Pokok Pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislative menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi ini kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

## 2. Logical Framework dan Cascading



**Gambar 3.13 Sistem Logical Framework dan Cascading**

Cascading memastikan Program Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program kegiatan ini pelaksanaannya dimonitoring kinerjanya untuk memantau perkembangan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### **Tujuan 4. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan**

#### **11) Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan**

Sebagai daerah perkotaan di Denpasar terdapat banyak perusahaan industri mulai dari home industri hingga industri dengan kapasitas besar yang melibatkan banyak tenaga kerja. Selama tiga Tahun terakhir, PDRB lapangan usaha industri terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami peningkatan.

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB target Tahun 2020 sebesar 3,70 % dengan realisasi sebesar 3,82% tingkat capaian sebesar 103,24%. Artinya, persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kota Denpasar pada Tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB target Tahun 2020 sebesar 6,60% dengan realisasi sebesar 7,90% tingkat capaian sebesar 119,70%. Capaian indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Capaian Sasaran Strategis Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN</b>								
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	3.70	3.82	103.24	4.00	95.50
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	10.03	6.60	7.90	119.70	6.80	116.18
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :</b>						<b>111.47</b>		

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 111,47% (Baik Sekali). Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 yang sebesar 197,50%, maka rata-rata capaian kinerja Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 86,03%.

Penurunan tersebut disebabkan oleh:

1. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya beberapa target kegiatan

diantaranya pelatihan bagi IKM Agro, pelatihan IKM Aneka, Pameran produk berpotensi ekspor, pelaksanaan Denpasar Fashion Festival

2. Masih adanya produk UKM yang kurang memperhatikan kemasan ramah lingkungan
3. Masih adanya UKM/IKM yang melakukan pencatatan keuangan secara manual
4. Diperlukan berbagai terobosan untuk memasarkan produk UKM/IKM dalam masa pandemi Covid-19 sehingga mereka tetap produktif.
5. Perlunya Sosialisasi dan Monitoring dalam rangka kepatuhan terhadap protokol keamanan berniaga bagi pelaku usaha.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan menurunnya capaian kinerja pada sasaran berkembangnya industri pengolahan dan perdagangan antara lain :

1. Melakukan sinergi dengan Kementerian Perindustrian RI melaksanakan pelatihan bagi IKM yang terdampak Covid-19 yaitu pelatihan pengolahan kopi, pelatihan perbengkelan roda 2, serta pelatihan service HP. Selanjutnya pelatihan pembuatan APD yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali.
2. Melalui UPTD Layanan Desain Denpasar bekerjasama dengan Dekranasda Kota Denpasar, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, IDB Bali serta Bank BPD Bali melaksanakan Webinar Inovasi Desain Kemasan Produk Lokal Menembus Pasar Digital diharapkan dengan adanya webinar ini akan menambah wawasan para UKM/IKM untuk mempercantik kemasan produknya dan tetap ramah lingkungan.
3. Melakukan sinergi dengan PT Bamboomedia Cipta Persada melalui klinik TIK melaksanakan pelatihan secara online untuk UKM agar dapat mengelola bisnis dengan teknologi menggunakan aplikasi penjualan dan stok barang.
4. Terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dimasa pandemi Covid-19 adalah melakukan kerjasama dengan Dekranasda Kota Denpasar, Duta Plaza Denpasar dan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar

melaksanakan pameran gelar bersama industri dan perdagangan bermutu (Gema Tridatu) bertempat dibasement Matahari Duta Plaza Denpasar tanggal 24 – 30 November 2020

5. Membentuk Gugus Tugas dan Satgas Terpadu Pasar Rakyat yang bertugas melakukan sosialisasi dan monitoring protokol keamanan berniaga sesuai ketentuan yang berlaku bagi pedagang pasar rakyat, toko swalayan, SPBU, Distributor dan pelaku usaha.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan inovasi melalui Gelar Bersama Industri dan Perdagangan Bermutu dimana kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Disperindag dengan Dekranasda Kota Denpasar, Duta Plaza Denpasar dan Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan merupakan bagian dari rangkaian Denpasar Festival.

Kegiatan : Festival Rumah Belanja

Tanggal : 24 – 25 Pebruari 2020

Lokasi : Gedung Dharmanegara Alaya Lantai I, Jalan Mulawarman No. 1 Lumintang

**Gambar 3.14 Festival Rumah Belanja**



Kegiatan : Gema Tridatu  
Tanggal : 24 – 30 November 2020  
Lokasi : Basement Duta Plaza Denpasar (Barat Gramedia) Jl. Dewi Sartika no. 4G Denpasar

**Gambar 3.15 Gema Tridatu**



Kegiatan : Monitoring Barang Pokok Penting menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan  
Tanggal : 9 September 2020  
Lokasi : Pasar Badung

**Gambar 3.16 Monitoring Barang Pokok Penting menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan**



## **12) Sasaran Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

Guna menunjang pembangunan Ekonomi Desa dan meningkatkan kemandirian Desa Pakraman dengan segala aspeknya dipandang perlu mengadakan upaya-upaya untuk memperkuat kedudukan keuangan Desa Pakraman dengan mendirikan suatu badan usaha milik Desa Pakraman yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan potensi ini Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan Monitoring/Pembinaan ke LPD yang ada di Kota Denpasar. Pembinaan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk membina dan memantau perkembangan LPD, sehingga LPD mampu mengantisipasi permasalahan sedini mungkin dan mengembalikan operasional LPD-LPD yang kurang sehat secara bertahap serta memotivasi LPD untuk membuat terobosan-terobosan pemberdayaan ke depan. Untuk dapat memberikan gambaran dari kegiatan ini maka disusun laporan Monitoring LPD yang sekaligus berfungsi sebagai bahan evaluasi kegiatan pengembangan LPD di masa datang. LPD memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam pengembangan perekonomian di wilayah masing-masing, agar dapat terealisasikan secara optimal maka LPD ini dikelola dengan baik sebagaimana layaknya pengelolaan suatu lembaga keuangan melalui upaya pembinaan dan pemantauan oleh Tim Pembina LPD Kota Denpasar yang beranggotakan instansi terkait.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa disajikan pada Tabel 3. 20.

**Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 12 : MENINGKATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA</b>								
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	30.00	100.00	22.00	62.86	100.00	62.86
		Jml LPD	30	35	22		35	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :</b>						<b>62.86</b>		

Berdasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa indikator sasaran Lembaga Perkreditan Desa Sehat realisasinya belum mencapai target. Rata-rata capaian di Tahun 2020 sebesar 62,86% (Baik) mengalami penurunan sebesar 22,85%, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 85,71%.

Setiap Desa Pakraman di Kota Denpasar memiliki LPD sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 unit. Sampai dengan Tahun 2020, capaian LPD yang termasuk dalam kategori sehat sebanyak 22 LPD, sebanyak 5 LPD kategori cukup sehat, sebanyak 4 LPD dalam kategori kurang sehat dan sebanyak 3 LPD dengan kategori tidak sehat dan 1 LPD masih dalam audit.

Adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan antara lain : Kurang profesionalnya pengelola LPD serta kurang sempurnanya sistem administrasi LPD, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diarahkan kepada upaya-upaya sehingga pengelola LPD memiliki kemampuan menginovatifkan kinerja efisiensi dan daya saing, melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan senantiasa memberdayakan karyawan, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD, memiliki komitmen dan konsistensi pengembangan usaha serta bukan sekedar memenuhi tuntutan profitable secara komersial akan tetapi juga memiliki pertanggungjawaban sosial. Pengelolaan LPD yang belum dilaksanakan secara professional, dalam ini disebabkan pengelolaa atau pengurus LPD

yang belum berkompeten, dimana pengelola atau Pengawas LPD yang menangani Desa adat biasanya dipilih dilihat dari ke tokohhan atau di segani oleh warga, sehingga pengelola LPD belum dapat dilaksanakan secara professional.

### **13) Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil**

Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara ekonomi akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar.

Sangat disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Bali khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sejumlah 30.737 usaha mikro, 1.188 Usaha kecil dan 301 Usaha menengah sampai dengan Tahun 2020 dengan kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Denpasar. Oleh karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen,

serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

Strategi dan Kebijakan strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan UMKM

**Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL</b>								
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.50	0.50	100.00	2.50	20.00
		Jml UM	450	600	600	100.00	750	80.00
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66.00	70.00	66.00	94.29	75.00	88.00
		Koperasi	692	734	692		787	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :</b>						<b>97.14</b>		

Berdasarkan Tabel 3.21, pada indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat, realisasi di Tahun 2020 sebesar 94,29% atau sejumlah 692 unit koperasi dari target yang ditetapkan sebesar 70% yaitu 734 unit koperasi. Apabila dilihat dari data keragaan koperasi se-Kota Denpasar dapat dilihat pencapaian SHU koperasi secara keseluruhan sebesar Rp 69.250.000.000,- atau adanya penurunan sebesar 28,54% Untuk tahun 2019 sebesar Rp 96.908.650.100 atau dalam hal ini dimana SHU ini merupakan pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pencapaian persentase pada indikator koperasi yang SHUnya meningkat menjadi menurun hal ini dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hal tersebut juga berimbas kepada pendapatan koperasi. Adapun hal – hal yang dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

### **1. Pembinaan Terhadap Koperasi**

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi. Pembinaan dilakukan baik dari sisi kelembagaan ataupun dari SDM pengelola koperasi yang dilakukan dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikut sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

**Gambar 3.17 Pelaksanaan Diklat Pengawasan bagi Pengawas Koperasi**



## 2. Pengawasan

Untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan untuk menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi sehingga meningkatkan perekonomian daerah, dan dapat mengurangi resiko dari investasi *illegal* yang mengatasnamakan koperasi sehingga merugikan masyarakat.

**Gambar 3.18 Pelaksanaan Monev Pasca Diklat Bagi Peserta Diklat Koperasi**



### 3. Penyediaan Informasi Pasar

Bertujuan untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengupayakan dan memfasilitasi para pelaku Koperasi di kalangan Perbankan dan Pengusaha besar, BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dinas Koperasi turun secara langsung ke koperasi - koperasi untuk menyampaikan informasi Permodalan supaya koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan bantuan permodalan melalui KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKMRI.

Pada indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,50% (150 Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil), dalam hal pencapaian Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu - isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Tahun 2020 dengan adanya kasus Pandemi Covid-19 atau yg di kenal dengan virus corona yang melanda seluruh Dunia, menuntut Pelaku UMKM untuk berinovasi dalam hal penjualan dari pada produk yang dihasilkan, yang mana hasil dari penjualan produk UMKM secara online bisa meningkat. Adapun langkah - langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun ke lapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan - pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

**Gambar 3.19 Pelaksanaan Diklat PKL Penataan Gajah Mada**



2. Penyediaan Informasi pasar, Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.

**Gambar 3.20 Pelaksanaan Pameran Dalam Rangka HUT Kota Denpasar**



Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahanbaku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahanbaku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang

nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.

#### 14) Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Arah Kebijakan Strategis Bidang Investasi di Kota Denpasar diarahkan pada penyederhanaan terhadap perijinan dan meningkatkan kualitas laju perijinan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi disajikan pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Nilai Investasi**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI</b>										
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(25.78)	-	1,031.38	12.5	-	206.28
		Rupiah (Dalam Milyar)	7,617	5,303	5,653	106.60	5,435	104.01		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>						<b>106.60</b>				

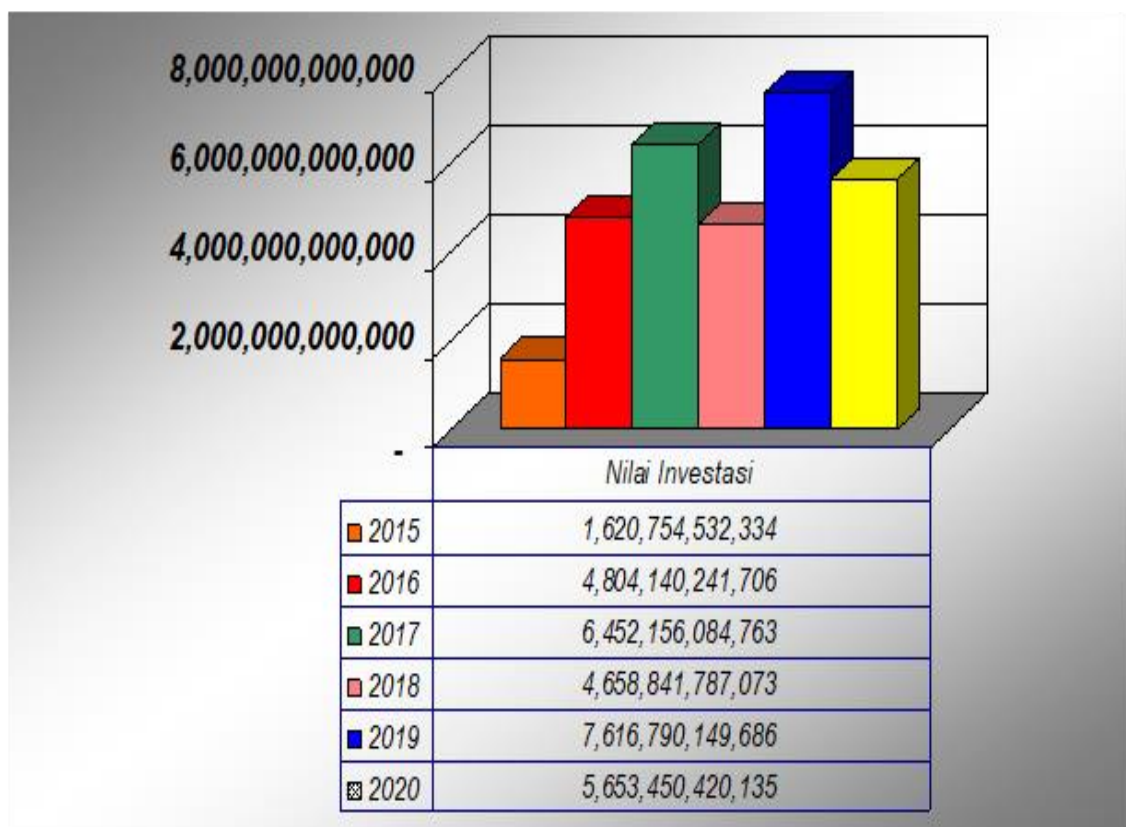
Berdasarkan Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa indikator sasaran Investasi Yang Tercatat pada PTSP capaiannya sebesar 106,60% (Baik sekali), dimana dari target Nilai Investasi Tahun 2020 yang tercantum pada RPJMD sebesar Rp 5.302.871.927.165,- diperoleh realisasi sebesar Rp 5.653.450.420.135,-

Akan tetapi, apabila dibandingkan realisasi nilai investasi pada tahun 2020 terhadap realisasi nilai investasi Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 25,77%. Investasi Tahun 2019 sebesar Rp 7.616.790.149.686,- sedangkan investasi Tahun 2020 sebesar Rp

5.653.450.420.135,- Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah menimbulkan dampak yang signifikan kepada seluruh aspek perekonomian, terutama di Kota Denpasar. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan perekonomian di Kota Denpasar menjadi lumpuh sehingga berdampak pada menurunnya nilai investasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar adalah :

- a. Melakukan promosi penanaman modal, perijinan dan non perijinan
- b. Menciptakan produk inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan.

**Gambar 3.21 Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2015-2020**



## 15) Sasaran Meningkatnya Pariwisata Berbasis Budaya

Sebagai ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi, dan didukung berbagai fasilitas wisata yang lengkap sehingga membuat liburan para wisatawan menjadi menyenangkan. Kota Denpasar merupakan Kota di Pulau Bali yang memiliki pertumbuhan industri pariwisata yang baik. Kota Denpasar juga menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan Kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya mendorong pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar, yang tidak terlepas dari arah dan kebijaksanaan kepariwisataan Provinsi Bali yang mengembangkan pariwisata budaya dengan didukung budaya Bali yang bernafaskan agama Hindu. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan bentuk pelayanan yaitu akomodasi, transportasi dan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah terarah dan terpadu tersebut terus ditingkatkan untuk mendukung kepariwisataan. Diharapkan upaya pembangunan dilakukan dapat mendukung perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Arah Kebijakan Strategis Bidang Pariwisata di Kota Denpasar diarahkan pada :

- (1) Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan atraksi wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat termasuk desa adat.
- (2) Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan koordiansi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan.
- (3) Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya disajikan pada Tabel 3.23.

**Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 15 : MENINGKATKAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA</b>								
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	709,536	635,329	56,302	8.86	667,086	8.44
26	Lama Tinggal Wisatawan							
	- Asing	Hari	3.14	3.15	3.15	100.00	3.16	99.68
	- Domestik	Hari	3.11	3.12	3.12	100.00	3.13	99.68
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	382,842	293,329	157,274	53.62	305,329	51.51
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>						<b>65.62</b>		

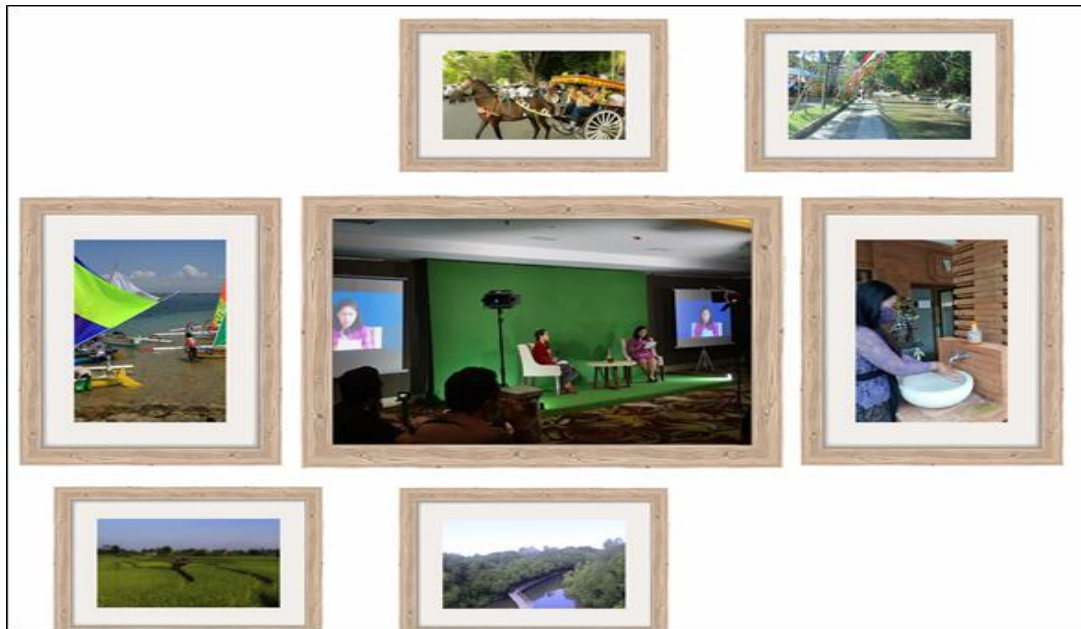
Berdasarkan Tabel 3.23, dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya pariwisata berbasis budaya realisasi rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah sebesar 65,62% (kurang). Capaian ini menurun sebesar 46,50% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 yang sebesar 112,11%. Dari tabel di atas juga dapat disimpulkan bahwa melihat hasil Kinerja sesuai dengan indikator yang dibuat untuk Kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar dengan menggunakan ukuran Skala Nilai Reliasasi Kinerja, satu indikator telah memenuhi target yang diharapkan dimana Indikator lama tinggal wisatawan meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar capaiannya sebesar 8,86%, dan Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan capaiannya sebesar 53,62%.

Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar merupakan variabel penting bagi Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Namun, munculnya Pandemi Covid-19 membuat kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar menurun drastis dan ini mempengaruhi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Situasi ini juga membuat pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar tidak dapat dicapai optimal termasuk upaya pencapaian sasaran 1; peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sangat menurun mencapai -91%. Hal ini tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu cenderung meningkat.

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar terus dilakukan. Pelaksanaan promosi pariwisata masih tetap merupakan cara efektif untuk kembali mencoba meningkatkan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar. Melalui promosi maka calon wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan dapat mengetahui Denpasar tetap aman, bersih dan menarik untuk dikunjungi. Selain itu, promosi sebagai bagian dari pemasaran jika dilakukan secara efektif dan efisien akan berdampak berpeluang meningkatkan kedatangan calon wisatawan potensial ataupun wisatawan repeater untuk selalu berminat berkunjung ke Kota Denpasar. Upaya promosi yang dilakukan selama pandemi ini adalah melalui “*Virtual Sale*” yang melibatkan biro perjalanan wisata baik dalam maupun luar negeri. Selain promosi, pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar. Kunci pengembangan destinasi terletak pada peran 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Kelembagaan/Ancillary). Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Denpasar Tahun 2020 sebesar 56.302 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan tahun 2019 tercatat 709.536. Ini berarti terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar -92% dibandingkan dengan tahun 2019. Faktor penyebab menurunnya capaian indikator ini karena wisatawan banyak membatalkan kunjungannya ke Bali termasuk ke Kota Denpasar akibat mewabahnya pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan kegiatan promosi untuk daya tarik wisata dan mempromosikan kesiapan

sarana protokol kesehatan untuk setiap daya tarik wisata di Kota Denpasar yang kesemuanya dilakukan melalui kegiatan “*Virtual Sale*”.

**Gambar 3.22 Kegiatan “*Virtual Sale*”**



Lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata di Kota Denpasar. Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk lebih banyak menikmati beragam daya tarik wisata Kota Denpasar, berbelanja atau membeli produk/jasa pendukung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil. Untuk itu rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar menjadi variabel penting untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Tercatat rata-rata lama wisatawan menginap di Kota Denpasar pada tahun 2020, untuk wisatawan asing sebesar 3.15 hari dan domestik sebesar 3.12 hari dan capain ini sudah sesuai dengan target kinerja yang diharapkan pada RPJMD.

Di masa pandemi Covid-19 usaha untuk mencapai kinerja ini tetap diupayakan. Strategi yang dilakukan adalah tetap memotivasi dan memfasilitasi kalangan swasta dan komunitas kreatif agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya mengemas beragam sumber daya pariwisata melalui inovasi dan kreatifitas Virtual sehingga

wisatawan tetap menarik kembali berkunjung setelah pandemi dan dapat tinggal lebih lama di Kota Denpasar. Beragam daya tarik wisata baik daya tarik wisata alam, budaya dan buatan Kota Denpasar terus dikembangkan dan dipromosikan secara berkelanjutan.

Untuk tetap meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Kota Denpasar agar tetap berdaya saing di masa pandemi, peningkatan fasilitas sarana daya tarik wisata terutama sarana protokol kesehatan terus dilaksanakan. Tujuannya agar daya tarik wisata di Kota Denpasar tetap siap menyediakan fasilitas ini apabila nantinya ada kunjungan wisatawan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu dilaksanakan pula sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang berbasis CHSE; *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) kepada pengelola usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya.

Indikator penerimaan pajak dari sektor pariwisata juga digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Alasannya, meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah khususnya dari sektor pariwisata baik penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan. Realisasi peningkatan jumlah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan Tahun 2020 sebesar Rp 157.273.846.732,27 dari target Rp 293.329.389.195,61 yang ditetapkan. Ini berarti terjadi penurunan capaian kinerja sebesar -46,38%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar juga mengalami penurunan.

Pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap berbagai lini, termasuk sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik hotel, restoran, usaha rekreasi dan tempat hiburan tingkat kunjungannya menurun sangat drastis. Hal ini membuat usaha pariwisata perkembangannya sangat terpuruk dan tidak dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Padahal industri pariwisata merupakan industri yang sangat penting dalam menunjang peningkatan PAD sektor pariwisata di Kota Denpasar. Namun demikian, untuk tetap menjaga agar perekonomian masyarakat tetap bisa berputar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar bekerja sama

dengan Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar membuat beragam kegiatan ekonomi kreatif berbasis teknologi digital yang bertujuan tidak saja menjaga citra Kota Denpasar sebagai kota kreatif namun juga membangun citra positif Kota Denpasar sebagai kota wisata yang aman, bersih dan tetap menarik untuk dikunjungi.

Dinas Pariwisata juga ikut membantu fasilitasi pembagian Dana Hibah Pariwisata dari Kemenparekraf yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjadi stimulus pergerakan ekonomi nasional di tengah pandemi terutama untuk Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan menerima bantuan adalah; Hotel sebanyak 134 hotel dan Restoran sebanyak 155 restoran.

Untuk menjaga agar kualitas dan kreatifitas industri pariwisata tetap berjalan dan menjaga kualitasnya di masa pandemi Covid-19, strategi kegiatan melalui Virtual lantas dikembangkan. Kegiatan diantaranya seperti; Webinar new normal standar 2020 (CHSE), Webinar tradisional spirit (Arak Bali) dan Komptensi food and beverage.

**Gambar 3.23 Webinar tradisional spirit (arak bali) dan Komptensi food and beverage**



Kendati industri kreatif menjadi salah satu sektor ekonomi yang juga sangat terdampak pada pandemi Covid-19, terutama dengan adanya pembatasan mobilitas orang dan barang, namun sektor ini masih memiliki peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar Dinas Pariwisata menyelenggarakan beberapa even kreatif. Kegiatan juga dikombinasikan dengan even Denpasar Festival yang digelar tiap tahun. Tujuan kegiatan ini sebagai wadah kreativitas, akselerasi serta mendukung perputaran perekonomian untuk membangkitkan geliat sektor UMKM di Kota Denpasar terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini. Denpasar Festival tahun ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari Food Festival, Craft, Fashion dan Exhibition, Virtual Fashion Show, dan Film Mebarung. Berikutnya, juga kegiatan Kompetisi Kreatif Piala Walikota, Visualisasi Puisi, Drama Satu Babak, Lomba Esai Foto Denfest 2020, Lomba Sketsa Denfest 2020, Lomba Ogoh-ogoh Virtual, Mendongeng, Late Art Competition, Music Battle, Workshop Fotografi, Workshop Keramik dan Workshop F&B. Tidak hanya itu, beragam hiburan dari tradisi modern dan kontemporer juga dihadirkan untuk menghibur masyarakat walaupun melalui virtual dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

**Gambar 3.24 Kegiatan Denpasar Festival Secara Virtual**



**Tujuan 5. Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa**

---

## **16) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendorong kesadaran masyarakat Kota Denpasar guna peduli terhadap lingkungan hidupnya. Dalam upaya untuk pelestarian lingkungan hidup di Kota Denpasar, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pengusaha, serta sekolah wajib untuk berperan aktif karena kita perlu sadari bahwa lingkungan merupakan tempat manusia tinggal dan memperoleh penghidupan. Selain itu, Bali yang terkenal dengan wisata alamnya, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan agar para wisatawan nyaman saat berkunjung ke Bali dan masyarakatpun nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali mempunyai permasalahan yang kompleksitas termasuk masalah sampah, dimana sampai saat ini Kota Denpasar belum dapat secara maksimal dalam mengelola management persampahan disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

Disadari atau tidak sebenarnya sampah merupakan bagian dari keseharian kita. Setiap aktivitas manusia, pasti menghasilkan buangan sampah. Persoalan seperti ini, tidak dapat dibiarkan begitu saja, kita harus bersikap untuk mengupayakan pengelolaan dan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

**Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								
28	Sampah tereduksi	Persen	26.00	28.00	27.00	96.43	30.00	90.00
29	Indeks LH	Indeks	55.240	55.000	55.720	101.309	55.240	100.869
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>						<b>98.87</b>		

Berdasarkan Tabel 3.24, Persentase volume sampah tereduksi tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 volume sampah tereduksi di Kota Denpasar mencapai 26% dan tahun 2020 mencapai 27%. Namun jika dibandingkan dengan target indikator kinerja tahun 2020 yaitu sebesar 28%, maka nilai capaian kinerja sebesar 27% belum mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 96,43%. Hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 aktifitas /kegiatan masyarakat dibatasi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah secara tatap muka juga dikurangi, yang mengakibatkan pada tahun 2020 kegiatan bank sampah dan produksi kompos di sekolah-sekolah juga tidak ada, sehingga mempengaruhi jumlah sampah yang didaur ulang/tereduksi menjadi berkurang yang berpengaruh pada capaian kinerja.

Dalam menghitung persentase volume pengurangan sampah (sampah tereduksi) digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah sampah yang didaur ulang}}{\text{jumlah volume sampah kota}} \times 100\%$$

Untuk perkiraan volume sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 946.509 jiwa dan prediksi peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah seremonial/ kegiatan lainnya, maka produksi sampah Kota Denpasar per tahun sebesar = 1.464.680,76 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 969.867

m<sup>3</sup>/tahun, sehingga sisa sampah Kota Denpasar sebesar 494.814 m<sup>3</sup>/tahun. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80% merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar 395.851,008 m<sup>3</sup>/tahun atau sebesar 27%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu melakukan kerjasama dengan dua yayasan yaitu MC Kensey dan Asosiasi Pengolahan Sampah Indonesia (APSI) yang sanggup memberikan edukasi menerima sampah anorganik dalam kondisi terpilah dan melakukan pendampingan di 6(enam) desa, yaitu Desa Kesiman Kertalangu, Desa Pemogan, Desa Tegal Kerta, Desa Ubung Kaja, Desa Pemecutan Kaja dan Desa Sanur Kauh. Menghimbau kepada Perbekel atau Lurah agar mewajibkan warganya memilah sampah di tingkat rumah tangga atau skala kawasan, sesuai Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 658/6766/DLHK, mengoptimalkan keberadaan TPSS menjadi TPS 3R, memaksimalkan dan meningkatkan operasional TPS 3R yang sudah ada baik yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar maupun yang dikelola oleh Desa/Kelurahan. Meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat agar memilah sampah dan memproses menjadi kompos skala rumah tangga atau skala kawasan. Meningkatkan pembentukan bank sampah baik di instansi pemerintah atau swasta di Kota Denpasar, pembentukan TPS di masing-masing desa/kelurahan dengan memanfaatkan tanah aset Propinsi Bali dan aset Kota Denpasar, meningkatkan pengelolaan sampah skala kawasan melalui pembentukan swakelola mandiri di masing-masing desa/kelurahan.

Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.25.

**Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	50	50,69	101,38%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	87	85,559	98,34%
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	35	37,11	106,03%
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>					
<b>Indek Kualitas LH</b>			<b>55</b>	<b>55,72</b>	<b>101,31%</b>

Sumber : DLHK Kota Denpasar

Berdasarkan Tabel 3.25, diketahui bahwa pada Tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari komponen Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan dari target 55 tercapai 55,72 (101,31%). Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKLH di Kota Denpasar Tahun 2019 yang mencapai 55,24. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target IKLH nasional tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor: P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016, dengan target sebesar 66,5 - 68,5 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2020 belum mencapai target IKLH nasional. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan wajib sebesar Rp 906.126.758.637,23 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 803.727.738.539,50 atau dengan serapan dana

APBD mencapai 88,70%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, komposisi belanja APBD Kota Denpasar dan realisasinya seperti Tabel 3.26.

**Tabel 3.26 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020**

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	1.274.652.516.935,90	1.080.825.373.307,11	84,79
2	Belanja Langsung	906.126.758.637,23	803.727.738.539,50	88,70
	<b>Jumlah</b>	<b>2.180.779.275.576,13</b>	<b>1.884.553.111.850,61</b>	<b>86,42</b>

Sumber : BPKAD Kota Denpasar, 2020

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 57,35% dari realisasi belanja Kota Denpasar di Tahun 2020 dan sisanya sebesar 42,65% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.430.171.684.720,62. Berdasarkan refokusing anggaran yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) kali mengacu pada Perwali Kota No. 57 Tahun 2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp 2.180.779.275.576,13 dengan Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.884.553.111.850,61 atau 86,42%, dapat dilihat pada Tabel 3.26.

**Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	10.242.497.834,00	7.382.826.994,00	72,08
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	40.395.187.390,00	37.977.663.490,00	94,02
3	Mengentaskan Kemiskinan	4.994.684.500,00	4.749.984.500,00	95,10
4	Mengurangi Pengangguran	825.913.750,00	791.442.150,00	95,83
5	Meningkatkan derajat	221.845.649.888,55	95.820.720.851,36	43,19
6	Meningkatkan kualitas	126.532.883.757,60	117.143.164.523,81	92,58
7	Meningkatnya pengarusu-	3.605.853.700,00	2.954.006.850,00	81,92
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	42.914.160.636,80	40.406.901.903,00	94,16
9	Meningkatnya kualitas insfrastruktur	31.422.928.802,00	25.320.576.681,00	80,58
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	7.842.341.128,00	6.814.304.360,00	86,89
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	651.079.491,00	646.382.399,00	99,28
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	-	-	0,00
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi masyarakat Kecil	1.945.793.600,00	1.869.266.565,00	96,07
14	Meningkatnya nilai Investasi	29.850.000,00	14.600.000,00	48,91
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis Budaya	15.095.614.450,00	9.511.894.577,00	0,63
16	Meningkatnya Kualitas	42.181.393.439,16	35.635.117.589,01	84,48
<b>Jumlah</b>		<b>550.525.832.367,11</b>	<b>387.038.853.433,18</b>	<b>70,30</b>

Sumber : BAPPEDA Kota Denpasar 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.27 diatas dapat diketahui persentase realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar 70,30%, menurun sebesar 17,78% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2019 yang sebesar 88,08%. Hal tersebut disebabkan karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.28.

**Tabel 3.28 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>MISI 1</b>					
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	92.20	7,382,826,994.00	72.08
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	N/A	37,977,663,490.00	94.02
<b>MISI 2</b>					
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	99.96	4,749,984,500.00	95.10
4	Mengurangi Pengangguran	1	98.69	791,442,150.00	95.83
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	100.42	95,820,720,851.36	43.19
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	98.45	117,143,164,523.81	92.58
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	115.56	2,954,006,850.00	81.92
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	155.00	40,406,901,903.00	94.16
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	103.91	25,320,576,681.00	80.58
<b>MISI 3</b>					
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	98.34	6,814,304,360.00	86.89
<b>MISI 4</b>					
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	111.47	646,382,399.00	99.28
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	62.86	0.00	0.00
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	97.14	1,869,266,565.00	96.07
14	Meningkatnya nilai investasi	1	106.60	14,600,000.00	48.91
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	65.62	9,511,894,577.00	0.63
<b>MISI 5</b>					
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	98.87	35,635,117,589.01	84.48

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2019 (Data diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

#### D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.29 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 (enam belas) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% tidak ada. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>MISI 1</b>					
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	92.20	72.08	20.12
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	N/A	94.02	N/A
<b>MISI 2</b>					
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	99.96	95.10	4.86
4	Mengurangi Pengangguran	1	98.69	95.83	2.86
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	100.42	43.19	57.22
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	98.45	92.58	5.87
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	115.56	81.92	33.64
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	155.00	94.16	60.84
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	103.91	80.58	23.33
<b>MISI 3</b>					
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	98.34	86.89	11.45

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>MISI 4</b>					
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	111.47	99.28	12.19
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	62.86	0.00	62.86
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	97.14	96.07	1.08
14	Meningkatnya nilai investasi	1	106.60	48.91	57.69
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	65.62	0.63	64.99
<b>MISI 5</b>					
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	98.87	84.48	14.39

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.29, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran sudah efisien. Dari ke 16 (enam belas) sasaran tersebut diatas, masih terdapat sasaran yang belum dapat dihitung tingkat efisiensinya yaitu, sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya, yang diukur menggunakan Indeks Kebudayaan, yang sampai saat ini belum ada data publish terkait indeks kebudayaan untuk kabupaten/kota. Sasaran Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil menjadi sasaran yang terendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 1,08% hal ini dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga berimbas kepada perkembangan ekonomi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sedangkan sasaran yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi adalah Sasaran Meningkatkan Pariwisata Berbasis Budaya dengan tingkat efisiensi sebesar 64,99%.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020. LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, sebagai berikut :

- 12 indikator atau 41,37% kategori Baik Sekali dan melampaui target;
- 13 indikator atau 44,83% kategori Baik;
- 1 indikator atau 3,45% kategori Cukup;
- 2 indikator atau 6,9% kategori Kurang;
- 1 indikator atau 3,45% kategori Data Belum Tersedia.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja Tahun Keempat yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk Tahun 2020 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan diupayakan untuk dipenuhi dalam sisa waktu RPJMD sampai akhir Tahun 2021 dengan memprioritas program/kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja dari indikator yang belum tercapai. Terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang belum mencapai target yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kategori Baik, 1 (satu) Indikator Kategori Cukup, 2 (dua) Indikator Kategori Kurang. Maka diupayakan beberapa langkah kedepan yang kiranya dapat diambil antara lain adalah :

1. Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan

Dimana dari target sasaran seluas 2.320 ha pada Tahun 2020 hanya terealisasi 1.958 ha. Adapun langkah kongkrit kedepan yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Upaya utama yang dilakukan adalah membangun sinergitas antar Perangkat Daerah terutama di bidang Perizinan, Pertanian, Kebudayaan serta Ketrentaman dan Ketertiban Umum termasuk Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai Lingkungan/Dusun.

2. Angka Kemiskinan

Langkah kongkrit kedepan yang sekiranya dapat dilaksanakan dalam upaya pencapaian atas target sasaran mengentaskan kemiskinan adalah optimalisasi pelaksanaan Kota Tangguh Sosial dengan penguatan basis data (*database*) penduduk miskin sampai ke penyebab terjadinya kemiskinan serta sinergitas Perangkat Daerah yang terlibat dalam Kota Tangguh Sosial.

3. Angka Pengangguran

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja

4. Indeks Pendidikan

Melihat belum pastinya kondisi Pandemi Covid-19, maka upaya jangka pendek yang dilakukan adalah optimalisasi pembelajaran jarak jauh dalam rangka memaksimalkan proses belajar mengajar. Vaksinasi bagi tenaga pendidik dan staf sekolah agar diprioritaskan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, sehingga pembelajaran tatap muka langsung dapat dilaksanakan segera. Selain itu, penambahan ruang belajar dan jumlah sekolah terutama pendidikan dasar merupakan kebutuhan mendesak

ketika pandemi Covid-19 mulai menurun dan tatap muka kembali dibuka, untuk memenuhi komposisi jumlah siswa dan ruang belajar.

5. Jalan Kondisi Baik

Langkah kongkrit kedepan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan dan menjaga persentase kondisi jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap. Dengan kualitas jalan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

6. Koperasi yang SHU-nya Meningkatkan

Langkah kongkrit kedepan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan terhadap Koperasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi khususnya untuk mendorong inovasi dalam menghadapi Pandemi Covid-19, melakukan Pengawasan dan Penyediaan Informasi Pasar

7. Sampah Tereduksi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu melakukan kerjasama dengan dua yayasan yaitu MC Kensey dan Asosiasi Pengolahan Sampah Indonesia (APSI) yang sanggup memberikan edukasi menerima sampah anorganik dalam kondisi terpilah dan melakukan pendampingan di 6(enam) desa, yaitu Desa Kesiman Kertalangu, Desa Pemogan, Desa Tegal Kerta, Desa Ubung Kaja, Desa Pemecutan Kaja dan Desa Sanur Kauh. Menghimbau kepada Perbekel atau Lurah agar mewajibkan warganya memilah sampah di tingkat rumah tangga atau skala kawasan, sesuai Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 658/6766/DLHK, mengoptimalkan keberadaan TPSS menjadi TPS 3R, memaksimalkan dan meningkatkan operasional TPS 3R yang sudah ada baik yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar maupun yang dikelola oleh Desa/Kelurahan. Meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat agar memilah sampah dan memproses menjadi kompos skala rumah tangga atau skala kawasan. Meningkatkan

pembentukan bank sampah baik di instansi pemerintah atau swasta di Kota Denpasar, pembentukan TPS di masing-masing desa/kelurahan dengan memanfaatkan tanah aset Propinsi Bali dan aset Kota Denpasar, meningkatkan pengelolaan sampah skala kawasan melalui pembentukan swakelola mandiri di masing-masing desa/kelurahan.

8. Lembaga Perkreditan Desa Sehat

Upaya yang dilakukan adalah dengan optimalisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga pengelola LPD memiliki kemampuan menginovatifkan kinerja efisiensi dan daya saing, melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan senantiasa memberdayakan karyawan, tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD, memiliki komitmen dan konsistensi pengembangan usaha serta bukan sekedar memenuhi tuntutan profitable secara komersial akan tetapi juga memiliki pertanggungjawaban sosial. Selain itu upaya yang dilakukan adalah terus mendorong optimalisasi pengelolaan LPD secara profesional.

9. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan kegiatan promosi untuk daya tarik wisata dan mempromosikan kesiapan sarana protokol kesehatan untuk setiap daya tarik wisata di Kota Denpasar yang kesemuanya dilakukan melalui kegiatan “*Virtual Sale*”.

10. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Untuk tetap menjaga agar perekonomian masyarakat tetap bisa berputar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar membuat beragam kegiatan ekonomi kreatif berbasis teknologi digital yang bertujuan tidak saja menjaga citra Kota Denpasar sebagai kota kreatif namun juga membangun citra positif Kota Denpasar sebagai kota wisata yang aman, bersih dan tetap menarik untuk dikunjungi. Dinas Pariwisata juga ikut membantu fasilitasi pembagian Dana Hibah Pariwisata dari Kemenparekraf yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjadi stimulus pergerakan ekonomi nasional di tengah pandemi terutama untuk Industri Hotel dan



Restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19. Untuk menjaga agar kualitas dan kreatifitas industri pariwisata tetap berjalan dan menjaga kualitasnya di masa pandemi Covid-19, strategi kegiatan melalui Virtual lantas dikembangkan. Kegiatan diantaranya seperti; Webinar new normal standar 2020 (CHSE), Webinar tradisional spirit (arak Bali) dan Kompetensi food and beverage.



Denpasar, 29 Maret 2021

Walikota Denpasar,

**GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.**



## LAMPIRAN



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/201M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar;
5. Tujuan adalah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran *output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar diberikan tugas untuk mengumpulkan, menyusun dan merumuskan hasil *review* akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Inspektorat Kota Denpasar melakukan *review* atas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini serta melaporkan kepada Walikota Denpasar.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

##### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2018



Plt. Walikota Denpasar

Crusti Ngurah Jaya Negara

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2018



Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, Msi

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR .....

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TANGGAL 27 MARET 2018  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicators* atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Denpasar beserta Perangkat Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari indikator capaian kinerja utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Pasal 3 antara lain disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan pasal 4 (3) disebutkan antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Kota Denpasar perlu diformalkan dalam bentuk Peraturan Walikota, dimana Indikator Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## B. Maksud dan Tujuan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai tolok ukur kinerja utama baik itu di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar, Dinas Daerah Kota Denpasar, Badan Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, dan Rumah Sakita Daerah Kota Denpasar berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 melalui kompilasi seluruh kegiatan strategis dari seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat Aspek, Fokus, Indikator dan Penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah Kota Denpasar yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil *outcome* sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Kota Denpasar berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 2017 Nomor 3);

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar mencakup indikator kinerja utama atas sasaran, program dan kegiatan utama Kota Denpasar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah (Bagian - bagian di lingkungan Sekretariat Daerah), Dinas Dinas, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama memuat tolok ukur kinerja atas Aparatur, Program-Program Utama, Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada keluaran (output) maupun hasil (outcome) untuk indikator masing-masing Sekretariat (Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah), serta Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor), Dinas-Dinas yang meliputi Perangkat Daerah pada Tabel berikut.:

Tabel 1.1  
Perangkat Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar</li> <li>2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar</li> <li>3. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar</li> <li>4. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar</li> <li>5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar</li> <li>6. Bagian Umum Setda Kota Denpasar</li> <li>7. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar</li> <li>8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar</li> <li>9. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar</li> <li>10. Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar</li> </ol>
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar
3	Inspektorat Kota Denpasar
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
8	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
20	Dinas Sosial Kota Denpasar
21	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
23	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
28	Dinas Pertanian Kota Denpasar
29	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
30	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
32	RSUD Wangaya
33	Camat Denpasar Barat
34	Camat Denpasar Timur
35	Camat Denpasar Selatan
36	Camat Denpasar Utara

#### D. SISTEMATIKA

Adapun Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Denpasar menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang baik. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama *Core Area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat Kota Denpasar tumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh Visi "**DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN**" karena itu tidak berlebihan bila pada periode 2016-2021 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk menguatkan pondasi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2016-2021, dibutuhkan strategi kreatif dan inovatif, diantaranya aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistimatis, partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable*).

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu penetapan indikator kinerja utama ditujukan untuk untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) Aspek Utama dan 13 (Tiga Belas) Sasaran yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ketahanan Pangan
3. Kesejahteraan Rakyat
4. Kebudayaan dan Pariwisata

B. Aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Pendidikan dan Olah Raga
2. Kesehatan
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban

C. Aspek Daya Saing Daerah yang terdiri dari 5 fokus utama yaitu:

1. Perekonomian
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Lingkungan Hidup
4. Iklim Berinvestasi
5. Kreativitas dan Inovasi

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 13 fokus yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Ketola pemerintah yang Baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur.
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
8. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan Inovasi
11. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, disampaikan pada Lampiran II.

### BAB III

#### PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar merupakan media peningkatan kinerja Pemerintah dimana setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama tersebut akan terus diupayakan diantara masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pencapaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja utama akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja dimasing-masing perangkat daerah pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam perumusan dan penetapan indikator kinerja utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup perangkat daerah, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.



Plt. Walikota Denpasar

Custi Ngurah Jaya Negara

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 16 TAHUN 2018  
 TANGGAL 27 MARET 2018  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
1	Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Areal lahan pertanian yang dapat dipertahankan akibat alih fungsi lahan
				2	Indeks Tri Hita Karana	Mengambarkan keberhasilan dalam membangun sikap hidup masyarakat yang seimbang antara memuja. Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia, serta mengembangkan kasih-sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Melihat kinerja dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)	Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata rata kesempatan hidup atau waktu hidup yang tersisa
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
				10	Katagori Kota Layak Anak	Menggambarkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%).	Menggambarkan upaya/penanganan untuk mengurangi kekumuhan kawasan permukiman.

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%).	Panjang jalan yang memenuhi kreteria kondisi jalan baik.
				13	Titik Genangan (%)	Untuk melihat keberhasilan dalam mengatasi titik genangan.
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan rumah tangga terhadap akses jaringan sanitasi.
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang terlindungi
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	Menggambarkan Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan.
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	Tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR		PENJELASAN
1	2		3	4		5
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor Industri pengolahan dalam pembentukan PDRB.
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap penguatan lembaga adat dalam peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha kecil
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas koperasi
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Menggambarkan perkembangan ekonomi daerah yang layak untuk investasi

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
		15 Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Menggambarkan perkembangan sekor pariwisata
			26 Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik	Menggambarkan tingkat kunjungan ke obyek daya tarik wisata
			27 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Menggambarkan jumlah uang yang dibelanjakan di daerah
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan	16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28 Sampah tereduksi (%)	Jumlah sampah yang dihasilkan dikurangi dengan jumlah sampah yang dibawa ke TPA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
	manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa		29 Indeks LH	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.



Plt. Walikota Denpasar

Crusti Ngurah Jaya Negara



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 3 Februari 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1		2		3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.320
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80,11
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2,05%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,30%
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.51
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	12,9
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78,75%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	66,84%
		13	Titik Genangan	Titik	4
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	80.582

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1		2		3	4
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,94%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	A
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,7%
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,6%
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100%
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50%
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	70%
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2,5%
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	635.329
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3,15
			- Domestik	Hari	3,12
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Juta rupiah	293.329,39

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2020		
1	2	3	4		
	Restoran, Pajak Hiburan				
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	28%
		29	Indeks LH	Indeks	55

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 2.430.171.684.720,62** (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah koma Enam Puluh Dua Sen).



WALIKOTA DENPASAR,

RAJAHARMAWIJAYA MANTRA

## PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMKOT DENPASAR TAHUN 2020

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN
1	Januari	Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019	Kementerian Sosial	Pemkot Denpasar mampu wujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH)
2		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2019	Kementerian Sosial	Pemkot Denpasar bersungguh-sungguh mengantarkan Keluarga Penerima Manfaat
3	Maret	Visionary Leader	SINDO MEDIA	Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra, katagori The Best On Transformative Government karena dinilai sebagai sebagai pemimpin yang telah mampu mewujudkan Innovative Government dengan mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Bali.
4	Juli	TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik	Kementerian PAN dan RB RI	Pemkot Denpasar mampu memberikan inovasi bidang pendidikan melalui "MAYA SI TEKMAS" (manajemen layanan anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) berbasis teknologi dan masyarakat.
5	Agustus	Penghargaan Sensus Penduduk 2020	Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat	Komitmen Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020
6		6 Besar Kota peraih penghargaan Langit Biru kategori Kota Besar di Indonesia	Kementerian Lingkungan Hidup	Komitmen dan serius Pemkot Denpasar dalam mendukung terciptanya udara yang bersih dan berkualitas
7	September	WTP 8 Kali	BPK RI	Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil menyampaikan laporan disusun dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam tahun ke empat penerapan basis akrual.

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>DARI</b>	<b>KETERANGAN</b>
8	Oktober	'Public Service Award of The Year Bali 2020'	MarkPlus Indonesia	Pemerintah Kota Denpasar, kembali berhasil meraih penghargaan dalam aspek pelayanan publik yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar.
9		Penghargaan 4th Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2020 untuk kategori Smart Society.	Citiasia Inc.	penghargaan atas inovasi Jaga Baya yang diluncurkan dalam rangka mendukung masyarakat produktif dan aman covid-19.
10	Nopember	Penghargaan Raih WTP 8 Kali	Kementerian Keuangan	Delapan kali berturut-turut Pemkot Denpasar mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali diapresiasi Kementerian Keuangan RI dengan memberikan penghargaan.
11		Penghargaan LPPD Terbaik	Kementerian Dalam Negeri	Berhasil melaksanakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TH 2018
12	Desember	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Bali	Pemkot Denpasar berhasil melaksanakan program keterbukaan informasi publik
13		Kota Terinovatif se-Indonesia dalam Panganugrahan IGA Tahun 2020.	Kementerian Dalam Negeri	Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.
14		Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan HAM RI	Komitmen Pemkot Denpasar guna memenuhi hak masyarakat di segala bidang.

**TABEL RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SASARAN 1 : MENGUATNYA KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA TRADISIONAL</b>									
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	2,320	1,958	84.40	2,289	85.54	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	95.50	80.11	80.11	100.00	80.21	99.88	1. Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :</b>						<b>92.20</b>			
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA</b>									
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :</b>						<b>N/A</b>			
<b>SASARAN 3 : MENGENTASKAN KEMISKINAN</b>									
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.10	2.05	2.14	99.96	2.00	99.96	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :</b>						<b>99.96</b>			
<b>SASARAN 4 : MENGURANGI PEGANGGURAN</b>									
5	Angka Pengangguran	Persen	2.22	3.30	7.62	98.69	3.25	98.69	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :</b>						<b>98.69</b>			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SASARAN 5 :MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.68	74.51	74.82	100.42	74.63	100.25	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10. Program dan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 13. Program Peningkatan Pelayanan Lansia 14. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 15. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 18. Program Keluarga Berencana 19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 21. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 22. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 23. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 24. Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan 25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 26. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani 27. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 28. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :</b>						<b>100.42</b>			

**SASARAN 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.69	12.90	12.70	98.45	12.96	97.99	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>3. Program Pendidikan Non Formal</li> <li>4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> <li>6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</li> <li>7. Program Pendidikan Menengah</li> </ul>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :</b>						<b>98.45</b>			
<b>SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.89	78.75	96.92	123.07	80.00	121.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</li> <li>2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</li> <li>3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</li> </ul>
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58.25	60.00	62.16	103.60	60.00	103.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</li> <li>6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</li> </ul>
10	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Nindya	Utama	120	Nindya	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Program Perlindungan Anak</li> <li>8. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>9. Program Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :</b>						<b>115.56</b>			
<b>SASARAN 8 : MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN</b>									

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Luas permukiman kumuh	Persen	23.08	20.00	31.00	155.00	33.84	91.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perumahan</li> <li>2. Program Lingkungan Sehat Perumahan</li> <li>3. program Pengelolaan Areal Pemakaman</li> <li>4. Program Pengembangan Estetika Kota</li> <li>5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>6. Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>7. Program Pemanfaatan Ruang</li> <li>8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</li> </ul>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :</b>						<b>155.00</b>			
<b>SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>									
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188.90	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.68	89.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</li> <li>3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>4. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan</li> <li>5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan</li> <li>6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</li> <li>7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</li> </ul>
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25			
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100.00	4	100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</li> <li>2. Program Pengendalian Banjir</li> </ul>
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	86,250	80,582	88,559	109.90	81,044	109.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> </ul>
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	54.98	47.94	54.41	113.50	48.04	113.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> </ul>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :</b>						<b>103.91</b>			
<b>SASARAN 10 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL</b>									

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.48	83.00	87.16	105.01	84.00	103.76	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100	1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB		AA		1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 8. Program Penerapan pemerintahan yang baik 9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 10. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
			72.02	80.01	72.02	90.01	90.01	80.01	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :</b>						<b>98.34</b>			
<b>SASARAN 11 : BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN</b>									
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	3.70	3.82	103.24	4.00	95.50	1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	10.03	6.60	7.90	119.70	6.80	116.18	5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 7. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :</b>						<b>111.47</b>			
<b>SASARAN 12 : MENINGATNYA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA</b>									
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	30.00	100.00	22.00	62.86	100.00	62.86	1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Jml LPD	30	35	22		35		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :</b>						<b>62.86</b>			
<b>SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL</b>									
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.50	0.50	100.00	2.50	20.00	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
		Jml UM	450	600	600	100.00	750	80.00	
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66.00	70.00	66.00	94.29	75.00	88.00	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Koperasi	692	734	692		787		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :</b>						<b>97.14</b>			
<b>SASARAN 14 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI</b>									
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(25.78)	1,031.38	12.5	- 206.28	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Rupiah (Dalam Milyar)	7,617	5,303	5,653	106.60	5,435	104.01	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :</b>						<b>106.60</b>			
<b>SASARAN 15 : MENINGKATKAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA</b>									

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)	Program Kegiatan Prioritas
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	709,536	635,329	56,302	8.86	667,086	8.44	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan
26	Lama Tinggal Wisatawan								
	- Asing	Hari	3.14	3.15	3.15	100.00	3.16	99.68	
	- Domestik	Hari	3.11	3.12	3.12	100.00	3.13	99.68	
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	382,842	293,329	157,274	53.62	305,329	51.51	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :</b>						<b>65.62</b>			
<b>SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
28	Sampah tereduksi	Persen	26.00	28.00	27.00	96.43	30.00	90.00	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
29	Indeks LH	Indeks	55.240	55.000	55.720	101.309	55.240	100.869	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :</b>						<b>98.87</b>			



Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar  
Telp. (0361) 234831 , Fax. (0361) 221534



[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id)  
email : [organisasi\\_denpasar@yahoo.co.id](mailto:organisasi_denpasar@yahoo.co.id)



denpasarkota  
bagor.denpasar

